



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR MKH-3.PR.01.01 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
TAHUN 2025-2029

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dibutuhkan indikator kinerja utama sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasysarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 468);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasysarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasysarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 846).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasysarakatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut IKU Renstra Kemenko Kumham Imipas Tahun 2025-2029 merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasysarakatan.

- KEDUA : IKU Renstra Kemenko Kumham Imipas Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai acuan dalam melakukan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja dalam implementasi dari sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap tahun oleh setiap pimpinan unit kerja dan telah dilakukan evaluasi keakuratan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan.
- KEEMPAT : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dimaksud dalam DIKTUM KETIGA disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2026

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN
PEMASYARAKATAN,



YUSRI IHA MAHENDRA

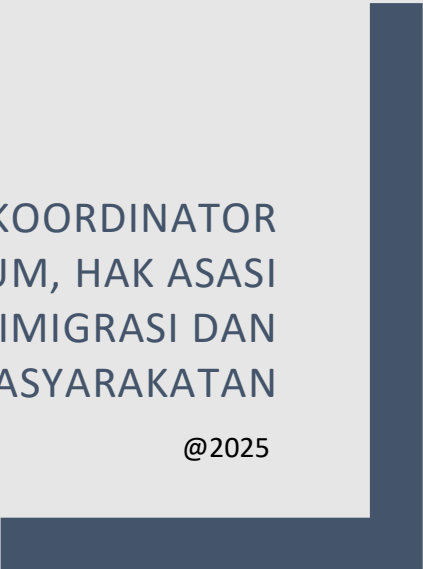


DOKUMEN

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG HUKUM, HAK ASASI
MANUSIA, IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN

@2025



SASARAN STRATEGIS (SS) SS.1 Terwujudnya sinergi Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) IKSS 1.1 Indeks Pembangunan Hukum (indikator RPJMN)	PENANGGUNG JAWAB IKSS Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	0,7
	SATUAN IKSS: Indeks	

DEFINISI

- IPH merupakan indeks yang mengukur capaian kinerja pembangunan hukum melalui pengukuran pilar yang merupakan komponen dalam pembangunan hukum Indonesia. Kelima pilar tersebut adalah:
 1. Pilar Budaya Hukum
 2. Pilar Materi Hukum
 3. Pilar Kelembagaan Hukum
 4. Pilar Penegakan Hukum
 5. Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum
- Dalam pengukuran IPH, terdapat kategori penilaian yang menjadi acuan sebagai berikut:

KATEGORI	ANGKA
Sangat Kurang	0.00 – 0.20
Kurang	0.21 – 0.40
Cukup	0.41 – 0.60
Baik	0.61 – 0.80
Sangat Baik	0.81 – 1.00

BUKTI REALISASI

Laporan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Hukum

SUMBER DATA

Deputi Bidang Hukum

LEVEL KINERJA : Kinerja strategis sektor

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : 0,4

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) dilakukan dengan formula:

$$IPH = (W_{PBH} \times PBH) + (W_{PMH} \times PMH) + (W_{PKH} \times PKH) + (W_{PPH} \times PPH) + (W_{PIKH} \times PIKH)$$

Dimana:

- W_{PBH} = Bobot Pilar Budaya Hukum
 - PBH = Indeks Pilar Budaya Hukum
 - W_{PMH} = Bobot Pilar Materi Hukum
 - PMH = Indeks Pilar Materi Hukum
 - W_{PKH} = Bobot Pilar Kelembagaan Hukum
 - PKH = Indeks Pilar Kelembagaan Hukum
 - W_{PPH} = Bobot Pilar Penegakan Hukum
 - PPH = Indeks Pilar Penegakan Hukum
 - W_{PIKH} = Bobot Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum
 - PIKH = Indeks Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum
-
-

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data hasil pengukuran parameter Pilar Budaya Hukum
2. Ambil data hasil pengukuran parameter Pilar Materi Hukum
3. Ambil data hasil pengukuran parameter Pilar Kelembagaan Hukum
4. Ambil data hasil pengukuran parameter Pilar Penegakan Hukum
5. Ambil data hasil pengukuran parameter Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

BPHN Kementerian Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

BPHN Kementerian Hukum

CATATAN KHUSUS

- Detail instrumen dituangkan dalam pedoman pengukuran IPH yang terpisah dari Manual IKSS ini.

SASARAN STRATEGIS (SS) SS.1 Terwujudnya sinergi Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) IKSS 1.2 Indeks sinergitas pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKSS Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	0,8
	SATUAN IKSS: Indeks	

DEFINISI

- IKSS ini mengukur keselarasan perencanaan, pelaksanaan hingga capaian kinerja pembangunan hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan;
- Sinergitas diukur melalui 2 (dua) variabel, meliputi:
 1. Rata-rata capaian kinerja pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan.
 2. Persentase permasalahan lintas K/L yang tidak terselesaikan pada tahun berjalan sebagai variabel koreksi terkait permasalahan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan
- Capaian kinerja pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan diukur melalui rata-rata capaian kinerja ketiga Kementerian dibawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Kumham Imipas, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi manusia serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
- Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan melalui pengukuran capaian IKSS terkait dengan program teknis Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi manusia serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang merepresentasikan capaian kinerja pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan.

BUKTI REALISASI

Laporan hasil pengukuran Indeks sinergitas pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

SUMBER DATA

Deputi Bidang Hukum, Deputi Bidang HAM, Deputi Bidang Imipras

LEVEL KINERJA : Kinerja strategis sektor

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : 0,4

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Indeks sinergitas pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan diukur dengan formula:

Sinergitas =

$$\{((W_{Kum} \times \mu_{Kum}) + (W_{HAM} \times \mu_{HAM}) + (W_{IMIPAS} \times \mu_{IMIPAS}))/100\} - \left(\frac{PTS}{TP} \times 100\%\right)$$

Dimana:

- W_{Kum} = Bobot rata-rata capaian kinerja pembangunan hukum Kemenkum
- μ_{Kum} = Rata-rata capaian kinerja pembangunan hukum Kemenkum, dihitung dengan formula: $\frac{\sum \text{Capaian IKSS teknis Kemenkum}}{\sum \text{total IKSS teknis Kemenkum}} \times 100\%$
- W_{HAM} = Bobot rata-rata capaian kinerja pembangunan HAM Kemen HAM
- μ_{HAM} = Rata-rata capaian kinerja pembangunan HAM Kemen HAM, dihitung dengan formula: $\frac{\sum \text{Capaian IKSS teknis KemenHAM}}{\sum \text{total IKSS teknis KemenHAM}} \times 100\%$
- W_{IMIPAS} = Bobot rata-rata capaian kinerja pembangunan Hukum Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipras

-
- μ IMIPAS = Rata-rata capaian kinerja pembangunan Hukum Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas, dihitung dengan formula:
$$\frac{\sum \text{Capaian IKSS teknis Kemen IMIPAS}}{\sum \text{total IKSS teknis Kemen IMIPAS}} \times 100\%$$
 - PTS = Permasalahan pembangunan nasional lintas K/L yang tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan
 - TP = Total permasalahan pembangunan nasional lintas K/L yang ditangani Kemenko Kumham Imipas pada tahun berjalan
-

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rata-rata capaian kinerja pembangunan hukum Kemenkum
 2. Ambil data rata-rata capaian kinerja pembangunan HAM Kemen HAM
 3. Ambil data rata-rata capaian kinerja pembangunan Hukum Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas
 4. Ambil data terkait permasalahan pembangunan nasional lintas K/L yang tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan
 5. Ambil data terkait total permasalahan pembangunan nasional lintas K/L yang ditangani Kemenko Kumham Imipas pada tahun berjalan
-

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Deputi Bidang Hukum, Deputi Bidang HAM, Deputi Bidang Imipas

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Deputi Bidang Hukum, Deputi Bidang HAM, Deputi Bidang Imipas
 - Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
-

CATATAN KHUSUS

- Capaian IKSS ketiga kementerian dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas diambil dari capaian IKSS teknis yang terkait langsung dengan RPJMN dan pembangunan Bidang Hukum, HAM, Imipas
- Permasalahan lintas K/L yang tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan menunjukkan kurang optimalnya sinergitas pembangunan nasional, sehingga hal ini menjadi faktor koreksi (pengurang) atas indeks sinergitas

SASARAN STRATEGIS (SS) SS.2 Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Bidang Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) IKSS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKSS Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	72,83
	SATUAN IKSS: Indeks (Nilai) 0 – 110	

DEFINISI

- Reformasi birokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki tata kelola untuk memperbaiki kinerja birokrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan melayani masyarakat
- Reformasi birokrasi menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional, lebih spesifik pada Prioritas Nasional 7 (PN 7) “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan”
- Arah kebijakan pelaksanaan RB berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2023 terbagi menjadi 2 (dua) yaitu RB Tematik dan RB General
- RB General fokus untuk menyelesaikan permasalahan di hulu atau isu yang berada pada internal Kementerian/Lembaga yaitu perbaikan manajemen seluruh instansi pemerintah
- RB Tematik fokus untuk menyelesaikan permasalahan di hilir atau isu dalam pembangunan nasional dimana RB diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional

BUKTI REALISASI

Lembar Hasil Evaluasi (LHE) RB
Kementerian Koordinator Bidang
Hukum, HAM, Imigrasi dan
Pemasyarakatan

SUMBER DATA

Kementerian PAN RB

LEVEL KINERJA : Kinerja strategis sektor

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact/Proxy*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : *Intermediate outcome Lv.1*

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Nilai RB Generik} + \text{Nilai RB Tematik Kemenko Bidang Kumham Imipras}}{\text{Target Nilai RB Kemenko Bidang Kumham Imipras}}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

6. Gunakan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) RB yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB
7. Bandingkan nilai RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (RB Tematik dan RB Generik) terhadap target kinerja

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PAN RB

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PAN RB

CATATAN KHUSUS

- Hingga saat ini, pembaharuan regulasi mengenai Reformasi Birokrasi belum tersedia
- Jika ada perubahan nomenklatur terkait Reformasi Birokrasi di tingkat nasional maka indikator ini perlu disesuaikan
- Jika penilaian dari Kementerian PAN RB belum tersedia dalam rentang waktu evaluasi tahunan (periode penulisan LAKIN), maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya atau menggunakan penilaian mandiri pelaksanaan RB oleh pengawas internal

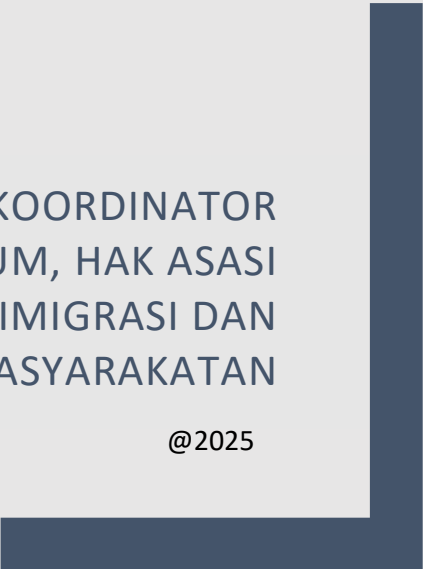


DOKUMEN

MANUAL INDIKATOR TUJUAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG HUKUM, HAK ASASI
MANUSIA, IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN

@2025



TUJUAN (T) T.1 Terwujudnya keselarasan strategis pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan INDIKATOR TUJUAN (IT) IT. 1.1: Indeks keselarasan strategis pelaksanaan pembangunan nasional	PENANGGUNG JAWAB IT Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	0,75
	SATUAN IT: Indeks (0-1)	

DEFINISI

- Indikator tujuan ini mengukur capaian pembangunan nasional bidang hukum serta sinergitas pembangunan bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasarakatan.
- Capaian pembangunan nasional bidang hukum diukur melalui pencapaian Indeks Penegakan Hukum (IPH), sedangkan sinergitas pembangunan bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasarakatan diukur melalui capaian Indeks sinergitas pembangunan bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasarakatan.

BUKTI REALISASI Laporan hasil pengukuran Indeks keselarasan strategis pelaksanaan pembangunan nasional	SUMBER DATA Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kumham Imipas
--	--

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Hitung Indeks keselarasan strategis pelaksanaan pembangunan nasional (IKSPPN), dengan formula

$$\text{IKSPPN} = \{(W_{\text{IPH}} \times \text{IPH}) + (W_{\text{Sinergitas}} \times \text{Sinergitas})\}$$

Dimana:

W_{IPH} = Bobot IPH pada Indikator Tujuan ini

IPH = Indeks Penegakan Hukum yang merupakan capaian pembangunan nasional bidang hukum

$W_{\text{Sinergitas}}$ = Bobot Indeks sinergitas pembangunan bidang hukum, HAM, imigrasi dan masyarakatan pada Indikator Tujuan ini

Sinergitas = Indeks sinergitas pembangunan bidang hukum, HAM, imigrasi dan masyarakatan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data Indeks Penegakan Hukum
2. Ambil data Indeks sinergitas pembangunan bidang hukum, HAM, imigrasi dan masyarakatan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kumham Imipas

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kumham Imipas

CATATAN KHUSUS

-

TUJUAN (T) Meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	PENANGGUNG JAWAB IT	
	Insert	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	-
INDIKATOR TUJUAN (IT) IT 2.1 Persentase peningkatan indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	SATUAN IT:	
	Persentase (%)	

DEFINISI

- Indikator tujuan ini mengukur peningkatan nilai RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan pada tahun berjalan dibanding dengan tahun baseline (tahun 2026)
- Membandingkan capaian nilai RB tahun berjalan dibanding tahun 2026 dilakukan untuk melihat apakah terjadi peningkatan secara konsisten terkait pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Saat manual ini disusun, pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 3 tahun 2023. Namun pelaksanaan RB kedepan akan mengikuti perubahan regulasi terkait pelaksanaan RB K/L.

BUKTI REALISASI

Laporan hasil pengukuran peningkatan indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

SUMBER DATA

Sekretariat Kementerian
Koordinator Bidang Kumham
Imipas

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Hitung Persentase peningkatan indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan formula

$$\times 100\%$$

Dimana:

RB_t = Nilai RB tahun berjalan

RB_{tb} = Nilai RB tahun baseline (2026)

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data RB tahun berjalan
2. Ambil data RB tahun *baseline*

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kumham Imipas

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kumham Imipas

CATATAN KHUSUS

1.1 MENTERI KOORDINATOR BIDANG KUMHAM IMIPAS

SASARAN STRATEGIS (SS) SS.2 Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Bidang Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) IKSS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKSS Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	72,83
	SATUAN IKSS: Indeks 0 – 110	

DEFINISI

- Reformasi birokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki tata kelola untuk memperbaiki kinerja birokrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan melayani masyarakat
- Reformasi birokrasi menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional, lebih spesifik pada Prioritas Nasional 7 (PN 7) “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan”
- Arah kebijakan pelaksanaan RB berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2023 terbagi menjadi 2 (dua) yaitu RB Tematik dan RB General
- RB General fokus untuk menyelesaikan permasalahan di hulu atau isu yang berada pada internal Kementerian/Lembaga yaitu perbaikan manajemen seluruh instansi pemerintah
- RB Tematik fokus untuk menyelesaikan permasalahan di hilir atau isu dalam pembangunan nasional dimana RB diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional

BUKTI REALISASI

Lembar Hasil Evaluasi (LHE) RB
Kementerian Koordinator Bidang
Hukum, HAM, Imigrasi dan
Pemasyarakatan

SUMBER DATA

Kementerian PAN RB

LEVEL KINERJA : Kinerja strategis sektor

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact/Proxy*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : *Intermediate outcome Lv.1*

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Nilai RB Generik} + \text{Nilai RB Tematik Kemenko Bidang Kumham Imipas}}{\text{Target Nilai RB Kemenko Bidang Kumham Imipas}}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Gunakan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) RB yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB
2. Bandingkan nilai RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (RB Tematik dan RB Generik) terhadap target kinerja

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PAN RB

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PAN RB

CATATAN KHUSUS

- Hingga saat ini, pembaharuan regulasi mengenai Reformasi Birokrasi belum tersedia
- Jika ada perubahan nomenklatur terkait Reformasi Birokrasi di tingkat nasional maka indikator ini perlu disesuaikan
- Jika penilaian dari Kementerian PAN RB belum tersedia dalam rentang waktu evaluasi tahunan (periode penulisan LAKIN), maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya atau menggunakan penilaian mandiri pelaksanaan RB oleh pengawas internal

1.2 SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG KUMHAM IMIPAS

SASARAN PROGRAM (SP) SP.1 Optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) IKP 1.1 Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKP Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	72,83
	SATUAN IKP: Indeks 0 – 100	

DEFINISI

- Reformasi birokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki tata kelola untuk memperbaiki kinerja birokrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan melayani masyarakat
- Reformasi birokrasi menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional, lebih spesifik pada Prioritas Nasional 7 (PN 7) “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan”
- Arah kebijakan pelaksanaan RB berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2023 terbagi menjadi 2 (dua) yaitu RB Tematik dan RB General
- RB General fokus untuk menyelesaikan permasalahan di hulu atau isu yang berada pada internal Kementerian/Lembaga yaitu perbaikan manajemen seluruh instansi pemerintah

BUKTI REALISASI

Lembar Hasil Evaluasi (LHE) RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan

SUMBER DATA

Kementerian PAN RB

LEVEL KINERJA	: Kinerja Strategis Sub Sektor
----------------------	--------------------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: <i>Intermediate Outcome Level 2</i>
---	---------------------------------------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome Level 1* → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome Level 2* → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai RB General Kemenko Bidang Kumham Imipas}}{\text{Target Nilai RB General Kemenko Bidang Kumham Imipas}}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Gunakan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) RB yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB
2. Bandingkan nilai RB Generik Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan terhadap target kinerja

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PAN RB

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PAN RB

CATATAN KHUSUS

- Hingga saat ini, pembaharuan regulasi mengenai Reformasi Birokrasi belum tersedia
- Jika ada perubahan nomenklatur terkait Reformasi Birokrasi di tingkat nasional maka indikator ini perlu disesuaikan
- Jika penilaian dari Kementerian PAN RB belum tersedia dalam rentang waktu evaluasi tahunan (periode penulisan LAKIN), maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya atau menggunakan penilaian mandiri pelaksanaan RB oleh pengawas internal
- RB General merupakan salah satu komponen penilaian dari total nilai RB keseluruhan dengan indeks maksimal 100

1.3 BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN HUKUM

1.3.1 SK 1 – IKK 1.1 INDEKS BER-AKHLAK

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Meningkatnya kualitas implementasi sistem nilai dan pengelolaan SDM Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Indeks BerAKHLAK Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	81
	SATUAN IKK: 0 – 100	

DEFINISI

- Indeks BerAKHLAK adalah alat ukur untuk mengetahui sejauh mana nilai inti (*core value*) ASN telah terimplementasi
- Nilai BerAKHLAK terdiri dari: Berorientasi pelayanan; Akuntabel; Kompeten; Harmonis; Loyal; Adaptif; Kolaboratif
- Kategori penilaian indeks BerAKHLAK terbagi menjadi lima sebagai berikut
- Kategori “Sangat Sehat” (Rentang skor 85 – 100)
- Kategori “Sehat” (70 – < 85)
- Kategori “Cukup Sehat” (55 – < 70)
- Kategori “Kurang Sehat” (40 – < 55)
- Kategori “Tidak Sehat” (< 40)

BUKTI REALISASI

Hasil pengukuran indeks BerAKHLAK Kementerian PAN RB

SUMBER DATA

Kementerian PAN RB

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: <i>Immediate Outcome</i>
---	----------------------------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
 - *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
 - *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
 - *Output* → Skor: 0,1
-

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Indeks BerAKHLAK Kemenko Bidang Kumham Imipas}}{\text{Target Indeks BerAKHLAK Kemenko Bidang Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Survei terhadap pegawai dan pimpinan
 2. Observasi perilaku dan praktik kerja
 3. Penilaian komitmen pimpinan dalam menanamkan budaya kerja.
 4. Ketersediaan kebijakan atau program yang mendukung nilai-nilai tersebut.
-

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PAN RB

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PAN RB

CATATAN KHUSUS

-
- Kementerian PAN RB tidak melakukan pengukuran Indeks BerAKHLAK, maka hasil pengukuran menggunakan tahun lalu
 - Mengingat Kemenko Bidang Kumham Imipas adalah Kementerian Koordinator yang baru dibentuk dan merupakan bagian dari Kemenko Polhukam, maka evaluasi indeks BerAKHLAK menggunakan nilai Kemenko Polhukam tahun 2024

1.3.2 SK 1 – IKK 1.2 INDEKS SISTEM MERIT

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Meningkatnya kualitas implementasi sistem nilai dan pengelolaan SDM Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.2 Indeks Sistem Merit Kementerian koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	350
	SATUAN IKK: Insert	

DEFINISI

- Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
- Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah.
- Variabel pengukuran sistem merit terbagi menjadi delapan aspek sebagai berikut
 - Perencanaan kebutuhan (Bobot 10%)
 - Pengadaan (10%)
 - Pengadaan karier (30%)
 - Promosi dan mutasi (10%)
 - Manajemen kinerja (20%)
 - Penggajian, penghargaan, dan disiplin (10%)
 - Perlindungan dan pelayanan (4%)
 - Sistem informasi (6%)

BUKTI REALISASI

LHE Sistem Merit Kemenko Bidang Kumham imipas

SUMBER DATA

Kementerian PAN RB

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: <i>Immediate Outcome</i>

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Sistem Merit}}{\text{Target Nilai Sistem Merit}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

Penilaian mandiri sistem merit dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penilaian kondisi saat ini
2. Pengumpulan bukti faktual yang relevan dan terkini
3. Penetapan skor untuk setiap sub aspek sesuai tingkat pemenuhan terhadap kondisi ideal
4. Penerapan nilai untuk masing-masing aspek menggunakan bobot yang sudah ditetapkan dan nilai total
5. Penetapan usulan tingkat penerapan sistem merit berdasarkan nilai untuk keseluruhan aspek
6. Penyiapan laporan yang menjelaskan proses dan hasil penilaian mandiri sistem merit
7. Penyampaian hasil Penilaian Mandiri Sistem Merit kepada PPK oleh Ketua Tim penilai

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PAN RB

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PAN RB

CATATAN KHUSUS

- Implementasi sistem merit mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara
- Kategori penilaian sistem merit sebagai berikut

NO	KATEGORI	NILAI	INDEKS	SEBUTAN
1	IV	325 - 400	0.81 – 1	Sangat Baik
2	III	250 - 324	0.61 - 0.8	Baik
3	II	175 - 249	0.41 - 0.6	Kurang
4	I	100 - 174	0.2 - 0.4	Buruk

1.3.3 SK 2 – IKK 2.1 RENCANA AKSI RB

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.2 Meningkatnya implementasi rencana aksi RB Kementerian koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 2.1 Persentase pelaksanaan rencana aksi RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	95
	SATUAN IKK: Persen	

DEFINISI

- Road map RB merupakan dokumen rencana strategis RB yang menjadi acuan penyelenggaraan RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan
- Rencana aksi RB adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam Road Map RB Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan
- Rencana aksi sedikitnya berisikan:
 - Rincian kegiatan
 - Indikator output dari rincian kegiatan
 - Target
 - Waktu pelaksanaan
 - Penanggung jawab

BUKTI REALISASI

Laporan pelaksanaan Rencana Aksi RB Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan

SUMBER DATA

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: <i>Immediate Outcome</i>
---	----------------------------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
 - *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
 - *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
 - *Output* → Skor: 0,1
-

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi pelaksanaan Rencana aksi RB}}{\text{Target pelaksanaan rencana aksi RB}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Identifikasi rincian kegiatan yang menjadi target pelaksanaan rencana aksi RB
 2. Identifikasi output yang dihasilkan dari kegiatan rencana aksi RB
 3. Bandingkan dengan output kegiatan rencana aksi RB pada Roadmap RB
 4. Jika *output* sudah sesuai, maka dapat diklaim bahwa rencana aksi telah dilaksanakan
-

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum

CATATAN KHUSUS

Tahapan pelaksanaan RB di tingkat Kementerian/Lembaga menurut Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024:

- Menetapkan *road map RB*
- Mengelola pelaksanaan rencana aksi;
- Monitoring dan Evaluasi RB; serta
- Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

1.3.4 SK 3 – IKK 3.1 INDEKS REFORMASI HUKUM

SASARAN KEGIATAN (SK) SK. 3 Meningkatnya kualitas layanan hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	79
	SATUAN IKK: Indeks 0 – 100	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 3.1 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan		

DEFINISI

- Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah sistem penilaian pelaksanaan Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- Penilaian IRH Kementerian/Lembaga terbagi atas empat variabel sebagai berikut:
 - Tingkat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan (Bobot 25%).
 - Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas (25%).
 - Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu (35%).
 - Penataan *database* peraturan perundang-undangan (15%).

BUKTI REALISASI

Lembar Hasil Evaluasi (LHE) IRH Kemenko Bidang Kumham Imipas

SUMBER DATA

Kementerian Hukum

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: <i>Immediate outcome</i>

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai IRH Kemenko Bidang Kumham Imipas}}{\text{Target Nilai IRH Kemenko Bidang Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Identifikasi capaian tingkat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan.
2. Identifikasi capaian kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas.
3. Identifikasi capaian kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu.
4. Identifikasi capaian penataan *database* peraturan perundang-undangan.

$$\text{Nilai IRH: } \sum_{n=1}^4 (\text{Nilai Tahapan}_N \times \text{Bobot Tahapan}_N)$$

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Hukum

CATATAN KHUSUS

Perhitungan IRH mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

1.3.5 SK 3 – IKK 3.2 INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.3 Meningkatnya kualitas layanan hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 3.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	84
	SATUAN IKK: Indeks 0 – 100	

DEFINISI

- Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen pengukuran kualitas proses pengelolaan kebijakan publik. Instrumen yang dikembangkan LAN ini digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengukur mulai dari perencanaan kebijakan sampai kemanfaatan kebijakan
- Instrumen pengukuran IKK secara garis besar terbagi menjadi dua proses, yaitu proses Perencanaan Kebijakan (Bobot 45%) dan proses Evaluasi Kemanfaatan (55%)
- Proses perencanaan kebijakan terbagi menjadi dua tahapan, meliputi: *agenda setting* kebijakan (45%) dan formulasi kebijakan (55%)
- Proses evaluasi kemanfaatan kebijakan terbagi menjadi dua tahapan, meliputi: implementasi kebijakan (50%) dan evaluasi kebijakan (50%)

BUKTI REALISASI

Lembar Hasil Evaluasi (LHE) IKK

SUMBER DATA

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: <i>Immediate outcome</i>
---	----------------------------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
 - *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
 - *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
 - *Output* → Skor: 0,1
-

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai IKK Kemenko Bidang Kumham Imipas}}{\text{Target Nilai IKK Kemenko Bidang Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Identifikasi total nilai tahapan agenda kebijakan *setting* (A)
2. Identifikasi total nilai tahapan agenda formulasi kebijakan (B)
3. Identifikasi total nilai tahapan agenda implementasi kebijakan (C)
4. Identifikasi total nilai tahapan agenda evaluasi kebijakan (D)

$$\text{Nilai IKK: } \sum_{n=1}^4 (\text{Nilai Tahapan}_N \times \text{Bobot Tahapan}_N)$$

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

CATATAN KHUSUS

- Penilaian IKK dilakukan oleh LAN secara periodik dalam waktu dua tahun sekali, maka untuk pengukuran tahunan dapat menggunakan capaian tahun lalu
- Penilaian IKK mengacu pada Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 Tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan

1.3.6 SK 3 – IKK 3.3 PENYELESAIAN LAYANAN ADVOKASI

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.3 Meningkatnya kualitas layanan hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 3.3 Persentase penyelesaian layanan advokasi hukum	PENANGGUNG JAWAB IKK Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	85
	SATUAN IKK: Persen 0 – 100	

DEFINISI

- Layanan advokasi hukum adalah layanan yang diberikan kepada internal Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan
- Layanan advokasi hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu layanan litigasi dan layanan non-litigasi
- Layanan hukum litigasi adalah layanan yang diberikan untuk penyelesaian sengketa di pengadilan, mulai dari proses peradilan, mulai dari persiapan dokumen, mediasi, hingga persidangan dan pelaksanaan putusan.
- Layanan hukum non-litigasi adalah layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

BUKTI REALISASI

Laporan pelaksanaan layanan hukum

SUMBER DATA

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum

1.3.7 SK 4 – IKK 4.1 CAPAIAN SISTEM KERJA

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 4. Terwujudnya sistem kerja baru Kementerian koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 4.1 Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi	PENANGGUNG JAWAB IKK Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	3
	SATUAN IKK: 1 – 5	

DEFINISI

- Indikator ini mengukur mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah telah mengimplementasikan sistem kerja baru sebagai bagian dari agenda penyederhanaan birokrasi
-

BUKTI REALISASI

Hasil survei kepuasan internal layanan Biro SDM, Organisasi dan Hukum

SUMBER DATA

Biro SDM, Organisasi dan Hukum

LEVEL KINERJA : Kinerja Taktikal

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : *Immediate outcome*

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Kepuasan Internal}}{\text{Target Tingkat Kepuasan Internal}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Tentukan variabel kepuasan internal
2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner
5. Hitung dengan rumus

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

6. Konversi nilai tersebut dengan rumus: SKM X 25
7. Petakan hasil perhitungan kedalam tabel berikut

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,62 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro SDM, Organisasi dan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro SDM, Organisasi dan Hukum

CATATAN KHUSUS

Penyusunan kuesioner kepuasan layanan Biro SDM, Organisasi dan Hukum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

1.4 BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA

1.4.1 SK 1 – IKK 1.1 SAKIP

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Meningkatnya kualitas perencanaan program dan perencanaan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Nilai SAKIP Kementerian koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	75,58
	SATUAN IKK: Indeks 0 – 100	

DEFINISI

- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
- Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021, Komponen evaluasi SAKIP terbagi menjadi 4 (empat), meliputi: Perencanaan Kinerja (Bobot 30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)
- Masing-masing komponen memiliki sub komponen sebagai berikut: Sub-Komponen Keberadaan (bobot 20%), Sub-Komponen kualitas (30%) dan Sub-Komponen Pemanfaatan (50%)
- Penilaian SAKIP terbagi menjadi enam predikat sebagai berikut
 - Predikat AA “Sangat Memuaskan” (Rentang nilai > 90 – 100)
 - Predikat A “Memuaskan” (> 80 – 90)
 - Predikat BB “Sangat Baik” (> 70 – 80)
 - Predikat B “Baik” (> 60 - 70)

- Predikat CC “Kurang” (> 30 – 50)
- Predikat D “Sangat Kurang” (> 0 – 30)

BUKTI REALISASI

Lembar Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP
Kemenko Bidang Kumham Imipas

SUMBER DATA

Kementerian PAN RB

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: <i>Immediate Outcome</i>

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan realisasi nilai SAKIP Kemenko Bidang Kumham Imipas menggunakan formula:

1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja (A)
2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja (B)
3. Nilai Komponen Pelaporan Kinerja (C)
4. Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (D)

$$\frac{\text{Realisasi Nilai SAKIP Kemenko Bidang Kumham Imipas}}{\text{Target Nilai SAKIP Kemenko Bidang Imipas}}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Gunakan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB

-
2. Bandingkan nilai SAKIP Kemenko Bldang Kumham Imipas terhadap target kinerja
-

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PAN RB

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PAN RB

CATATAN KHUSUS

Penilaian SAKIP Kementerian/Lembaga mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.4.2 SK 1 – IKK 1.2 INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 1. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan perencanaan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Masyarakat	PENANGGUNG JAWAB IKK	
	Insert	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	97
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.2 Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Masyarakat	SATUAN IKK: Indeks (0 – 100)	

DEFINISI

- Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) merupakan alat ukur yang bertujuan untuk memperkuat dan mempertajam keselarasan rencana pembangunan nasional
- IPPN digunakan untuk melihat kualitas perencanaan Kementerian/Lembaga dengan komponen utama melihat keselarasan antara perencanaan yang dirumuskan Kementerian/Lembaga dengan tujuan pembangunan nasional.
- Pembangunan Nasional dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025 – 2029 (RPJMN 2025 – 2029)
- Komponen penilaian IPPN terbagi menjadi tiga, yaitu integrasi, sinkronisasi dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja
- Komponen integrasi mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L pusat
- Sinkronisasi mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk membiayai RO Prioritas yang ditetapkan dalam RK serta mengukur kesesuaian Pagu Anggaran lintas dokumen perencanaan

- Keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja mengukur keterhubungan antara perencanaan kinerja instansi dengan substansi perencanaan pembangunan
- Kategori penilaian IPPN terbagi menjadi lima, sebagai berikut:
 - Kategori “Sangat Baik” (Rentang nilai 91 – 100)
 - Kategori “Baik” (Rentang nilai 81 – 90)
 - Kategori “Cukup Baik” (Rentang nilai 71 – 80)
 - Kategori “Kurang” (Rentang nilai 61 – 70)
 - Kategori “Sangat Kurang” (Nilai <60)

BUKTI REALISASI

Lembar Hasil Evaluasi (LHE) IPPN

SUMBER DATA

Kementerian PPN/Bappenas

LEVEL KINERJA : Kinerja Taktikal

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : *Immediate Outcome*

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai IPPN Kemenko Bidang Kumham Imipas}}{\text{Target Nilai IPPN Kemenko Bidang Kumham Imipas}}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Gunakan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) RB yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB
2. Identifikasi nilai IPPN Kemenko Bidang Kumham Imipas sebagai salah satu komponen RB General Kemenko Bidang Kumham Imipas
3. Bandingkan nilai IPPN Kemenko Bidang Kumham Imipas terhadap target kinerja

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PPN/Bappenas

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PPN/Bappenas

CATATAN KHUSUS

- IPPN mengacu pada Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan nasional
- Komponen integrasi terdiri dari tiga sub-komponen, meliputi: Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN, Konsisten Renja K/L terhadap Renstra K/L dan Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP
- Komponen sinkronisasi terdiri dari tiga sub-komponen, meliputi: kepatuhan anggaran K/L untuk membiayai RO prioritas RKP pada tahun perencanaan, kesesuaian pagu anggaran RKA dengan pagu anggaran Renja K/L dan kepatuhan anggaran K/L untuk membiayai RO prioritas RKP pada tahun pelaksanaan.
- Komponen keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja terdiri dari satu sub-komponen yaitu target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait

1.4.3 SK 2 – IKK 2.1 TINDAK LANJUT KERJA SAMA

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 2. Meningkatnya tindak lanjut pelaksanaan kerja sama Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 2.1 Persentase pelaksanaan tindak lanjut kerja sama Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK	
	Insert	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	92
SATUAN IKK: Persen (0 – 100)		

DEFINISI

- Indikator ini mengukur kuantitas pelaksanaan tindak lanjut kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta perwujudan visi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Kerja sama yang terjalin dan disepakati wajib memiliki bukti seperti *Memorandum of Understanding* (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS)
- Kerja sama yang terjalin wajib diterjemahkan hingga tingkatan berupa rencana aksi/kegiatan/inisiatif yang akan dilaksanakan
- Kerja sama yang dijalin wajib memiliki keterkaitan dengan kinerja dan pencapaian visi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

BUKTI REALISASI

Laporan pelaksanaan tindak lanjut kerja sama

SUMBER DATA

Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

LEVEL KINERJA : Kinerja Taktikal

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : *Immediate Outcome*

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

1. Identifikasi kerja sama yang terjalin
2. Identifikasi jumlah rencana aksi/kegiatan/inisiatif yang perlu ditindaklanjuti
3. Identifikasi jumlah rencana aksi/kegiatan/inisiatif yang ditindaklanjuti

$$\frac{\text{Realisasi Kegiatan Tindak Lanjut Kerja Sama}}{\text{Target Kegiatan Tindak Lanjut Kerja Sama}}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Identifikasi laporan pelaksanaan kegiatan tindak lanjut kerja sama dari masing-masing UKE 1 (A)
2. Identifikasi laporan pelaksanaan kegiatan tindak lanjut kerja sama dari masing-masing UKE 2 (B)
3. Identifikasi jumlah rencana aksi/kegiatan/inisiatif yang perlu ditindaklanjuti dari masing-masing kerja sama yang terjalin (C)

$$\frac{A + B}{C_1 + C_2 + \dots C_n}$$

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

CATATAN KHUSUS

- Administrasi kerja sama dilakukan secara terpusat oleh Bagian Kerja Sama
 - Biro Perencanaan dan Kerja Sama
- Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama dapat dilakukan oleh UKE 1 dan UKE 2

1.5 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI

1.5.1 SK.1 – IKK 1.1 INDEKS SPBE

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya transformasi digital Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Indeks SPBE Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	3,88
	SATUAN IKK: Indeks 1 – 5	

DEFINISI

- Nilai SPBE Kemenko Bidang Kumham Imipas merupakan penilaian atas pelaksanaan SPBE di lingkup Kemenko Bidang Kumham Imipas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pemantauan SPBE dilakukan dengan aktivitas Penilaian Mandiri (PM) dan Penilaian Dokumen
- Penilaian Mandiri (PM) dilakukan oleh Tim Asesor Internal Kemenko Bidang Kumham Imipas dengan pedoman penilaian mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Tim Asesor Internal Kemenko Bidang Kumham Imipas ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas melalui Keputusan Menteri Koordinator

BUKTI REALISASI

Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang hasil evaluasi pelaksanaan RB Kemenko Bidang Kumham Imipas, bagian indeks SPBE

SUMBER DATA

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

LEVEL KINERJA

: Kinerja Taktikal

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU

: *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU

: *Immediate outcome*

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU

: *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai SPBE Kemenko Bidang Kumham Imipas}}{\text{Target Nilai SPBE Kemenko Bidang Kumham Imipas}}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

Berdasarkan Permen PANRB nomor 59 tahun 2020

- **Indeks SPBE**

$$\text{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$$

Dimana:

- ND_j adalah nilai indeks domain ke-j;
- BD_j adalah nilai bobot domain ke-j.

▪ **Indeks Domain SPBE**

$$\text{Indeks Domain}_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$$

Dimana:

- Indeks Domain i adalah nilai indeks domain ke-i;
- BDi adalah nilai bobot domain ke-i;
- NAij adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-i;
- BAij adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-l.

▪ **Aspek SPBE**

$$\text{Indeks Aspek}_i = \frac{1}{BA_i} \sum_{j=m}^n NI_{ij} \times BI_{ij}$$

Dimana:

- Indeks Aspeki adalah nilai indeks aspek ke-i;
- BAi adalah nilai bobot aspek ke-i;
- NIij adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-j pada aspek ke-i;
- BIij adalah nilai bobot indikator ke-j pada aspek ke-l;

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

CATATAN KHUSUS

Tidak ada catatan khusus

1.5.2 SK 1 – IKK 1.2 TRANSFORMASI LAYANAN DIGITAL

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya transformasi digital Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 2.1 Persentase Transformasi layanan digital Kementerian koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	73
	SATUAN IKK: Persen 0 – 100	

DEFINISI

- Transformasi layanan digital merupakan proses mengubah metode pemberian layanan kepada masyarakat maupun Kementerian yang berada di bawah lingkup koordinasi Kemenko Bidang Kumham Imipias
- Tujuan transformasi layanan adalah mempercepat, meningkatkan efisiensi dan transparansi, meningkatkan keterjangkauan dan respons terhadap kebutuhan pengguna layanan

BUKTI REALISASI

Laporan transformasi layanan digital Kemenko Bidang Kumham Imipias

SUMBER DATA

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

LEVEL KINERJA

: Kinerja Taktikal

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU

: *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU

: *Immediate outcome*

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4

- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Transformasi Layanan Digital Kemenko Bidang Kumham Imipas}}{\text{Target Transformasi Layanan Digital Kemenko Bidang Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Identifikasi total layanan internal Kemenko Bidang Kumham Imipas
2. Identifikasi total layanan eksternal Kemenko Bidang Kumham Imipas
3. Identifikasi total layanan (internal dan eksternal) yang ditransformasi digital

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

CATATAN KHUSUS

Transformasi layanan dilakukan dengan memanfaatkan TIK

1.5.3 SK 2 – IKK 2.1 INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.2 Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan citra positif Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 2.1 Indeks Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	82
	SATUAN IKK: 0 – 100	

DEFINISI

- Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- Indeks Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keterbukaan informasi publik di Indonesia
- Tidak hanya seberapa banyak informasi yang dapat diakses publik, IKIP juga melihat kualitas dan relevansi informasi tersebut
- Informasi yang tersedia harus benar, akurat, dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh UU KIP
- KIP terdiri dari tiga dimensi meliputi lingkungan fisik/politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum
- Evaluasi KIP memberikan beberapa kualifikasi sebagai berikut:
 - Kualifikasi “Informatif” dengan nilai 90 – 100.
 - Kualifikasi “Menuju Informatif” dengan nilai 80 – 89,9.
 - Kualifikasi “Cukup” dengan nilai 60 – 79,9.
 - Kualifikasi “Kurang Informatif” dengan nilai 40 – 69,9.
 - Kualifikasi “Tidak Informatif” dengan nilai < 39,9.

BUKTI REALISASI

Laporan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahunan

SUMBER DATA

Komisi Informasi Pusat (KIP)

LEVEL KINERJA : Kinerja Taktikal

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : *Immediate outcome*

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi IKIP Kemenko Bidang Kumham Imipas}}{\text{Target IKIP Kemenko Bidang Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Gunakan hasil perhitungan IKIP Kemenko Bidang Kumham Imipas yang dikeluarkan KIP
2. Bandingkan nilai IKIP Kemenko Bidang Kumham Imipas terhadap target kinerja

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Komisi Informasi Pusat (KIP)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Komisi Informasi Pusat (KIP)

CATATAN KHUSUS

Pengukuran IKIP mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

1.5.4 SK 2 – IKK 2.2 INDEKS CITRA POSITIF

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.2 Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan citra positif Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 2.2 Indeks citra positif Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	81
	SATUAN IKK: Indeks (0 – 100)	

DEFINISI

- Indeks citra positif adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu organisasi atau individu dilihat oleh publik secara keseluruhan
- Citra positif Kemenko Bidang Kumham Imipas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjadi motivasi positif bagi Kemenko Bidang Kumham Imipas untuk meningkatkan kinerja

BUKTI REALISASI

Hasil perhitungan citra positif Kemenko Bidang Kumham Imipas

SUMBER DATA

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

LEVEL KINERJA : Kinerja Taktikal

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : *Immediate outcome*

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4

- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Indeks Citra Positif Kemenko Bidang Kumham Imipas}}{\text{Target Indeks Citra Positif Kemenko Bidang Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Identifikasi berita positif Kemenko Bidang Kumham Imipas pada televisi nasional (A)
2. Identifikasi berita positif Kemenko Bidang Kumham Imipas pada media daring (B)
3. Identifikasi berita positif Kemenko Bidang Kumham Imipas pada sosial media (C)
4. Identifikasi total berita Kemenko Bidang Kumham Imipas pada televisi nasional (D)
5. Identifikasi total berita Kemenko Bidang Kumham Imipas pada media daring (E)
6. Identifikasi total berita Kemenko Bidang Kumham Imipas pada sosial media (F)
7. Hitung dengan rumus:

$$\left(\left(\frac{A}{D} \right) + \left(\frac{B}{E} \right) + \left(\frac{C}{F} \right) \right) \times 100\%$$

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

CATATAN KHUSUS

Pemantauan berita pada media sosial dapat menggunakan *tools social media analytic*

1.6 BIRO UMUM DAN KEUANGAN

1.6.1 SK 1 – IKK 1.1 OPINI BPK

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan dan pelaksanaan anggaran INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Masyarakat	PENANGGUNG JAWAB IKK Kepala Biro Umum dan Keuangan	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	WTP (4)
	SATUAN IKK: Nilai 1 – 4	

DEFINISI

- Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria sebagai berikut:
 - Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
 - Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)
 - Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
 - Efektivitas sistem pengendalian internal
- Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, terdapat empat jenis Opini BPK yang diberikan BPK RI, meliputi
 - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – Bobot 4
 - Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) – Bobot 3
 - Opini Tidak Wajar – Bobot 2
 - Tidak Memberikan Pendapat (TMP) – Bobot 1

BUKTI REALISASI

Hasil audit laporan keuangan Kemenko Bidang Kumham Imipas oleh BPK

SUMBER DATA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: <i>Immediate outcome</i>
---	----------------------------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Opini BPK atas laporan keuangan Kemenko Bidang Kumham Imipas}}{\text{Target Opini BPK atas laporan keuangan Kemenko Bidang Kumham Imipas}}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Identifikasi Opini BPK atas laporan keuangan Kemenko Bidang Kumham Imipas berdasarkan laporan hasil audit keuangan BPK
2. Identifikasi opini BPK atas laporan keuangan Kemenko Bidang Kumham Imipas sebagai salah satu komponen RB General Kemenko Bidang Kumham Imipas
3. Bandingkan nilai opini BPK atas laporan keuangan Kemenko Bidang Kumham Imipas terhadap target kinerja
4. Lakukan konversi opini berdasarkan keterangan pada "Catatan Khusus"

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

CATATAN KHUSUS

- Opini BPK terhadap laporan keuangan bersifat kualitatif maka untuk keperluan perhitungan, opini kualitatif akan **dikonversi** menjadi kuantitatif sebagai berikut: WTP (bobot 4), WDP (bobot 3), Tidak Wajar (bobot 2), dan TMP (bobot 1)
- **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP):** Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

1.6.2 SK 1 – IKK 1.2 IKPA

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan dan pelaksanaan anggaran INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK Kepala Biro Umum dan Keuangan	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	86
	SATUAN IKK: Indeks (0 – 100)	

DEFINISI

- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- Pengukuran IKPA meliputi tiga aspek sebagai berikut:
 - Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran
 - Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran
 - Kualitas hasil evaluasi pelaksanaan anggaran
- Kategori Nilai IKPA dibagi menjadi empat sebagai berikut:
 - Sangat Baik (Nilai IKPA > 95)
 - Baik (89 < nilai IKPA < 95)
 - Cukup (70 < nilai IKPA < 89)
 - Kurang (Nilai IKPA <70)

BUKTI REALISASI

Screenshot online monitoring system Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) – Kementerian Keuangan

SUMBER DATA

Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: <i>Immediate outcome</i>

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai IKPA Kemenko Bidang Kumham Imipas}}{\text{Target Nilai IKPA Kemenko Bidang Kumham Imipas}}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Identifikasi nilai kualitas perencanaan anggaran
2. Identifikasi nilai kualitas pelaksanaan anggaran
3. Identifikasi nilai kualitas hasil pelaksanaan anggaran
4. Hitung dengan formula

$$\text{Nilai IKPA: } \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_N \times \text{Bobot Indikator}_N)$$

: *Konversi Bobot *) – Dispensasi SPM*

*) keterangan

- a) Konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai; dan

-
- b) Konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada K/L/unit Eselon I/Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan

CATATAN KHUSUS

Penilaian IKPA dilakukan merujuk kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga

1.6.3 SK 2 – IKK 2.1 TINGKAT DIGITALISASI ARSIP

SASARAN KEGIATAN (SK) SK. 2 Terwujudnya digitalisasi Arsip Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 2.1 Tingkat digitalisasi Arsip Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK Kepala Biro Umum dan Keuangan	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	98,2
	SATUAN IKK: Nilai 0 – 100	

DEFINISI

- Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik, dijelaskan bahwa arsip elektronik merupakan arsip yang diciptakan yaitu dibuat dan diterima dalam format elektronik atau arsip hasil alih media, sedangkan alih media arsip elektronik merupakan kegiatan pengalihan media arsip dari satu media ke media lain dalam rangka memudahkan akses arsip.
- Penilaian terhadap tingkat digitalisasi arsip tercakup dalam penilaian pengawasan kearsipan eksternal yang dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan menggunakan Instrumen Audit Pengelolaan Arsip Elektronik (APAE).
- Salah satu komponen dari APAE adalah digitalisasi arsip untuk mengukur kegiatan digitalisasi arsip melalui alih media sesuai dengan ketentuan
- Indeks ini memiliki skala penilaian dari 0 hingga 100, di mana 100 menunjukkan digitalisasi yang sempurna (semua arsip sudah didigitalkan).

BUKTI REALISASI

Hasil Pengawasan Kearsipan ANRI

SUMBER DATA

Arsip Nasional Republik
Indonesia (ANRI)

LEVEL KINERJA : Kinerja Taktikal

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : *Immediate outcome*

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Digitalisasi Arsip Kemenko Bidang Kumham Imipas}}{\text{Target Tingkat Digitalisasi Arsip Kemenko Bidang Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Gunakan Hasil Pengawasan Kearsipan ANRI tentang penilaian Digitalisasi Arsip Kemenko Bidang Kumham Imipas
2. Bandingkan nilai digitalisasi arsip Kemenko Bidang Kumham Imipas terhadap target kinerja

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

CATATAN KHUSUS

Kategori penilaian digitalisasi arsip digital terbagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut

- Nilai > 90-100 dengan kategori AA (sangat memuaskan);
- Nilai > 80-90 dengan kategori A (memuaskan);
- Nilai > 70-80 dengan kategori BB (sangat baik);
- Nilai > 60-70 dengan kategori B (baik);
- Nilai > 50-60 dengan kategori CC (cukup);
- Nilai > 30-50 dengan kategori C (kurang);
- Nilai 0-30 dengan kategori D (sangat kurang).

1.6.4 SK 3 – IKK 3.1 INDEKS PENGELOLAAN ASET

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 3. Meningkatnya kualitas layanan umum dan pengelolaan BMN Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 3.1 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK Kepala Biro Umum dan Keuangan	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	3,8
	SATUAN IKK: 0 – 4	

DEFINISI

- Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan parameter pengukuran penilaian kinerja di bidang pengelolaan BMN pada tahun bersangkutan yang dihitung dalam bentuk indeks dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN.
- Hasil pengukuran indikator kinerja pengelolaan BMN juga disebut sebagai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan evaluasi reformasi birokrasi general di lingkup Kementerian/Lembaga (K/L).
- Parameter dan Bobot IPA terbagi menjadi delapan parameter sebagai berikut:
 - Tindak lanjut temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN (Bobot 15%)
 - Realisasi PNBPN dari pengelolaan aset (10%)
 - Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian laporan dan usulan KRBMN (10%)
 - Asuransi BMN (10%)
 - Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (15%)
 - Tindak lanjut BMN rusak berat (10%)

- BMN memiliki dokumen kepemilikan (15%)
- Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan (15%)
- Parameter indeks pengelolaan aset terbagi menjadi empat sebagai berikut:
 - Indeks 4 (Sangat Baik)
 - Indeks 3 (Baik)
 - Indeks 2 (Cukup)
 - Indeks 1 (Buruk)

BUKTI REALISASI

Kertas Kerja Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

SUMBER DATA

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara – Kementerian Keuangan

LEVEL KINERJA : Kinerja Taktikal

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : *Immediate outcome*

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai IPA Kemenko Bidang Kumham Imipas}}{\text{Target Nilai IPA Kemenko Bidang Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Tindak lanjut temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN (A)
2. Realisasi PNBPN dari pengelolaan aset (B)
3. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian laporan dan usulan KRBMN (C)
4. Asuransi BMN (D)
5. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (E)
6. Tindak lanjut BMN rusak berat (F)
7. BMN memiliki dokumen kepemilikan (G)
8. Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan (H)
9. Hitung dengan formula:

$$\text{Nilai IKPA: } \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Parameter}_N \times \text{Bobot Parameter}_N)$$

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara – Kementerian Keuangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara – Kementerian Keuangan

CATATAN KHUSUS

Pengukuran Indikator Kinerja Pengelolaan Aset diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 Tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024

1.6.5 SK 3 – IKK 3.2 INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 2. Meningkatnya kualitas layanan umum dan pengelolaan BMN Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 2.2 Indeks Tata Kelola Pengadaan Kementerian koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK Kepala Biro Umum dan Keuangan	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	75
	SATUAN IKK: 0 – 100	

DEFINISI

- Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan parameter pengukuran penilaian kinerja di bidang pengelolaan BMN pada tahun bersangkutan yang dihitung dalam bentuk indeks dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN.
- Hasil pengukuran indikator kinerja pengelolaan BMN juga disebut sebagai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan evaluasi reformasi birokrasi general di lingkup Kementerian/Lembaga (K/L).
- Parameter dan Bobot IPA terbagi menjadi delapan parameter sebagai berikut:
 - Tindak lanjut temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN (Bobot 15%)
 - Realisasi PNBP dari pengelolaan aset (10%)
 - Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian laporan dan usulan KRBMN (10%)
 - Asuransi BMN (10%)
 - Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (15%)
 - Tindak lanjut BMN rusak berat (10%)

- BMN memiliki dokumen kepemilikan (15%)
- Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan (15%)
- Parameter indeks pengelolaan aset terbagi menjadi empat sebagai berikut:
 - Indeks 4 (Sangat Baik)
 - Indeks 3 (Baik)
 - Indeks 2 (Cukup)
 - Indeks 1 (Buruk)

BUKTI REALISASI

Kertas Kerja Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

SUMBER DATA

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara – Kementerian Keuangan

LEVEL KINERJA : Kinerja Taktikal

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : *Immediate outcome*

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai IPA Kemenko Bidang Kumham Imipas}}{\text{Target Nilai IPA Kemenko Bidang Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Tindak lanjut temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN (A)
2. Realisasi PNBPN dari pengelolaan aset (B)
3. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian laporan dan usulan KRBMN (C)
4. Asuransi BMN (D)
5. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (E)
6. Tindak lanjut BMN rusak berat (F)
7. BMN memiliki dokumen kepemilikan (G)
8. Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan (H)
9. Hitung dengan formula:

$$\text{Nilai IKPA: } \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Parameter}_N \times \text{Bobot Parameter}_N)$$

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara – Kementerian Keuangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara – Kementerian Keuangan

CATATAN KHUSUS

Pengukuran Indikator Kinerja Pengelolaan Aset diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 Tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024

1.6.6 SK 3 – IKK 3.3 TINGKAT KEPUASAN LAYANAN UMUM

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.2 Meningkatnya kualitas layanan umum dan pengelolaan BMN Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 2.3 Tingkat kepuasan terhadap layanan umum	PENANGGUNG JAWAB IKK Kepala Biro Umum dan Keuangan	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	3,15
	SATUAN IKK: Skala likert 1 – 4	

DEFINISI

- Tingkat kepuasan terhadap layanan umum merupakan ukuran mengenai persepsi penerima layanan internal yang diselenggarakan Biro Umum dan Keuangan, Layanan Biro Umum dan Keuangan meliputi:
- Layanan Dukungan Manajemen Internal
 - Layanan pengadaan Barang dan Jasa
 - Layanan BMN
 - Layanan Protokoler
 - Layanan Umum
 - Layanan Perkantoran
- Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 - Layanan Sarana Internal
 - Layanan Prasarana Internal
- Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - Layanan Manajemen Keuangan
 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

BUKTI REALISASI

Hasil survei kepuasan internal layanan
Biro Umum dan Keuangan

SUMBER DATA

Biro Umum dan Keuangan

LEVEL KINERJA : Kinerja Taktikal

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : *Immediate outcome*

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Kepuasan Internal}}{\text{Target Tingkat Kepuasan Internal}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Tentukan variabel kepuasan internal
2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner
5. Hitung dengan rumus

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

6. Konversi nilai tersebut dengan rumus: SKM X 25
7. Petakan hasil perhitungan kedalam tabel berikut

Nilai Persepsi	NilaiInterval	NilaiInterval Konversi	Mutu Pelayanan	KinerjaUnit Pelayanan
1	1,0022,5996	25,00264,99	D	TidakBaik
2	2,6023,064	65,00276,60	C	KurangBaik
3	3,064423,532	76,62288,30	B	Baik
4	3,532424,00	88,312100,00	A	SangatBaik

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum dan Keuangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum dan Keuangan

CATATAN KHUSUS

Penyusunan kuesioner kepuasan layanan Biro Umum dan Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

1.7 INSPEKTORAT

1.7.1 SK 1 – IKK 1.1 MATURITAS SPIP TERINTEGRASI

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Tingkat Maturitas SPIP terintegrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK Inspektur	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	3,02
	SATUAN IKK: 1 – 5	

DEFINISI

- Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021)
- Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021)
- Terdapat 5 (empat) Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP, yaitu:
 - Tingkat maturitas “**Rintisan**” dengan skor $1,00 \leq \text{skor} < 2,00$
 - Tingkat maturitas “**Berkembang**” dengan skor $2,00 \leq \text{skor} < 3,00$
 - Tingkat maturitas “**Terdefinisi**” dengan interval skor $3,00 \leq \text{skor} < 4,00$
 - Tingkat maturitas “**Terkelola dan terukur**” dengan interval skor $4,00 \leq \text{skor} < 4,50$
 - Tingkat maturitas “**Optimum**” dengan interval skor $\text{skor} \geq 4,50$

- Terdapat 4 (empat) unsur dalam penilaian maturitas SPIP terintegrasi, yaitu:
 - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - Manajemen Risiko Indeks (MRI)
 - Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, dan
 - Kapabilitas APIP

BUKTI REALISASI Surat dari BPKP tentang hasil penilaian maturitas SPIP Kemenko Bidang Kumham Imipas	SUMBER DATA BPKP
---	--------------------------------

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: <i>Immediate outcome</i>
---	----------------------------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula

$$\frac{\text{Target SPIP terintegrasi}}{\text{Realisasi SPIP terintegrasi}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Gunakan hasil perhitungan SPIP terintegrasi Kemenko Bidang Kumham Imipas yang dikeluarkan BPKP

-
2. Bandingkan nilai SPIP terintegrasi Kemenko Bidang Kumham Imipas terhadap target kinerja
-

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

CATATAN KHUSUS

Perhitungan maturitas SPIP terintegrasi mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

1.7.2 SK 1 – IKK 1.2 TINDAK LANJUT BPK

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.2 Persentase tindak lanjut temuan BPK atas laporan keuangan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK	
	Inspektur	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	100
SATUAN IKK: Persen 0 – 100		

DEFINISI

- Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan mekanisme kontrol yang dijalankan untuk memastikan bahwa rekomendasi dilaksanakan
- Rekomendasi merujuk pada hasil audit BPK pada Kemenko Bidang Kumham Imipias

BUKTI REALISASI	SUMBER DATA
Laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan BPK	Inspektorat

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: <i>Immediate outcome</i>

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan BPK yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi temuan BPK}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Identifikasi total rekomendasi tindak lanjut BPK untuk Kemenko Bidang Kumham Imipas
2. Identifikasi penanggung jawab rekomendasi tindak lanjut BPK dari masing-masing Unit Kerja
3. Identifikasi rekomendasi tindak lanjut BPK yang dilaksanakan masing-masing unit kerja

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat

CATATAN KHUSUS

- Pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut kerja sama dilakukan oleh masing-masing unit kerja
- Peran Inspektorat mengawasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut

1.7.3 SK 2 – IKK 2.1 TINGKAT KEPUASAN

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.2 Meningkatnya kepuasan terhadap layanan Inspektorat INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 2.3 Tingkat kepuasan layanan Inspektorat	PENANGGUNG JAWAB IKK Kepala Biro Umum dan Keuangan	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	3,15
	SATUAN IKK: Skala likert 1 – 4	

DEFINISI

- Tingkat kepuasan terhadap layanan Inspektorat merupakan ukuran mengenai persepsi penerima layanan internal yang diselenggarakan Inspektorat
- Layanan Inspektorat meliputi
 - Layanan audit internal
 - Bisa ditambahkan atau dikoreksi

BUKTI REALISASI

Hasil survei kepuasan internal layanan Inspektorat

SUMBER DATA

Inspektorat

LEVEL KINERJA : Kinerja Taktikal

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : *Immediate outcome*

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3

- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Kepuasan Internal}}{\text{Target Tingkat Kepuasan Internal}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Tentukan variabel kepuasan internal
2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner
5. Hitung dengan rumus

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

6. Konversi nilai tersebut dengan rumus: SKM X 25
7. Petakan hasil perhitungan kedalam tabel berikut

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,06 – 3,53	76,62 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat

CATATAN KHUSUS

Penyusunan kuesioner kepuasan layanan Inspektorat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

1.8 SEKRETARIAT DEPUTI

1.8.1 SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Meningkatnya kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum	PENANGGUNG JAWAB IKK Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	3,15
	SATUAN IKK: Skala likert 1 – 4	

DEFINISI

- Tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum merupakan ukuran mengenai persepsi penerima layanan internal yang diselenggarakan di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Hukum
- Layanan dukungan manajemen meliputi
 - Layanan rencana program, kegiatan, dan anggaran
 - Layanan pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja
 - Layanan pengelolaan data dan sistem informasi
 - Layanan administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan
 - Layanan pimpinan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan BMN
 - Layanan dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan
 - Layanan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern

BUKTI REALISASI

Hasil survei kepuasan internal layanan
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi
Hukum

SUMBER DATA

Sekretariat Deputi Bidang
Koordinasi Hukum

LEVEL KINERJA : Kinerja Taktikal

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : *Immediate outcome*

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Kepuasan Internal}}{\text{Target Tingkat Kepuasan Internal}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Tentukan variabel kepuasan internal
2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner
5. Hitung dengan rumus

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

6. Konversi nilai tersebut dengan rumus: SKM X 25
7. Petakan hasil perhitungan kedalam tabel berikut

Nilai Persepsi	NilaiInterval	NilaiInterval Konversi	Mutu Pelayanan	KinerjaUnit Pelayanan
1	1,0022,5996	25,00264,99	D	TidakBaik
2	2,6023,064	65,00276,60	C	KurangBaik
3	3,064423,532	76,62288,30	B	Baik
4	3,532424,00	88,312100,00	A	SangatBaik

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum

CATATAN KHUSUS

Penyusunan kuesioner kepuasan layanan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

1.8.2 SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Meningkatnya kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi HAM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi HAM	PENANGGUNG JAWAB IKK Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi HAM	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	3,15
	SATUAN IKK: Skala likert 1 – 4	

DEFINISI

- Tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi HAM merupakan ukuran mengenai persepsi penerima layanan internal yang diselenggarakan di lingkup Deputy Bidang Koordinasi HAM
- Layanan dukungan manajemen meliputi
 - Layanan rencana program, kegiatan, dan anggaran
 - Layanan pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja
 - Layanan pengelolaan data dan sistem informasi
 - Layanan administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan
 - Layanan pimpinan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan BMN
 - Layanan dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan
 - Layanan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern

BUKTI REALISASI

Hasil survei kepuasan internal layanan
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi
HAM

SUMBER DATA

Sekretariat Deputi Bidang
Koordinasi HAM

LEVEL KINERJA : Kinerja Taktikal

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : *Immediate outcome*

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Kepuasan Internal}}{\text{Target Tingkat Kepuasan Internal}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Tentukan variabel kepuasan internal
2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner
5. Hitung dengan rumus

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

6. Konversi nilai tersebut dengan rumus: SKM X 25
7. Petakan hasil perhitungan kedalam tabel berikut

Nilai Persepsi	NilaiInterval	NilaiInterval Konversi	Mutu Pelayanan	KinerjaUnit Pelayanan
1	1,0022,5996	25,00264,99	D	TidakBaik
2	2,6023,064	65,00276,60	C	KurangBaik
3	3,064423,532	76,62288,30	B	Baik
4	3,532424,00	88,312100,00	A	SangatBaik

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi HAM

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi HAM

CATATAN KHUSUS

Penyusunan kuesioner kepuasan layanan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

1.8.3 SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Meningkatnya kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	Insert	3,15
	SATUAN IKK: Skala likert 1 – 4	

DEFINISI

- Tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan ukuran mengenai persepsi penerima layanan internal yang diselenggarakan di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Layanan dukungan manajemen meliputi
 - Layanan rencana program, kegiatan, dan anggaran
 - Layanan pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja
 - Layanan pengelolaan data dan sistem informasi
 - Layanan administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan
 - Layanan pimpinan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan BMN
 - Layanan dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan
 - Layanan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern

BUKTI REALISASI

Hasil survei kepuasan internal layanan
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi
Imigrasi dan Pemasyarakatan

SUMBER DATA

Sekretariat Deputi Bidang
Koordinasi Imigrasi dan
Pemasyarakatan

LEVEL KINERJA : Kinerja Taktikal

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : *Immediate outcome*

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
 - *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
 - *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
 - *Output* → Skor: 0,1
-

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Kepuasan Internal}}{\text{Target Tingkat Kepuasan Internal}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Tentukan variabel kepuasan internal
2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner
5. Hitung dengan rumus

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

6. Konversi nilai tersebut dengan rumus: SKM X 25
7. Petakan hasil perhitungan kedalam tabel berikut

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,06-4,35	76,62-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Penyusunan kuesioner kepuasan layanan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

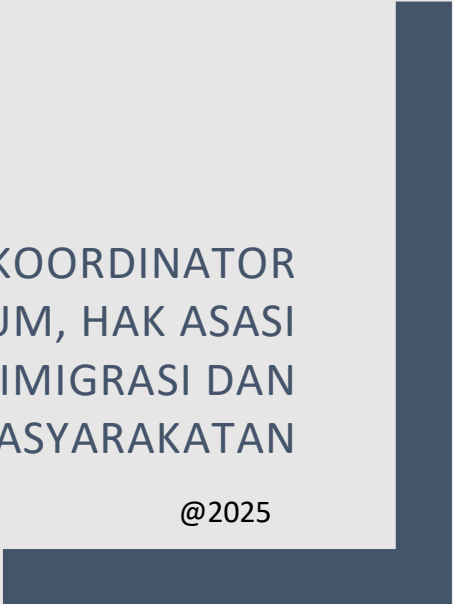


DOKUMEN

MANUAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM LINGKUP DEPUTI BIDANG HUKUM

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG HUKUM, HAK ASASI
MANUSIA, IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN

@2025





MANUAL IKP DEPUTI BIDANG HUKUM

SASARAN PROGRAM (SP) SP.1 Terwujudnya pembangunan hukum, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang hukum INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) IKP 1.1 Persentase rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L terkait pilar pembangunan hukum pada IPH	PENANGGUNG JAWAB IKP Deputi Bidang Hukum	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKP: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKP ini mengukur banyaknya pemanfaatan rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas terkait pilar pembangunan hukum pada IPH.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil pengukuran IPH pada seluruh pilar IPH.
- Pemanfaatan rekomendasi kebijakan dapat berupa perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan (aksi) dan/atau Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan lainnya berdasarkan rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas terkait pilar pembangunan hukum.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan, maka semakin baik capaian kinerja IKP ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung pemanfaatan rekomendasi kebijakan terkait pilar pembangunan hukum pada IPH

SUMBER DATA

Deputi Bidang Hukum

LEVEL KINERJA	: Kinerja strategis sub sektor
----------------------	--------------------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,3
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L terkait pilar pembangunan hukum pada IPH, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan terkait pilar IPH yang dimanfaatkan}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan terkait pilar IPH yang dimanfaatkan K/L
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan terkait pilar IPH yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Deputi Bidang Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Deputi Bidang Hukum

CATATAN KHUSUS

- Data dukung pembuktian pemanfaatan rekomendasi kebijakan terkait pilar IPH didapatkan melalui:
 - Laporan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi kebijakan terkait pilar IPH yang diberikan Kemenko Kumham Imipas, dan/atau
 - *Policy brief*/Naskah Akademik/Naskah Urgensi yang menjadi landasan dalam penyusunan PUU terkait rekomendasi kebijakan yang diberikan, dan/atau
 - Data dukung spesifik yang diberikan Kementerian Hukum terkait pemanfaatan rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

SASARAN PROGRAM (SP) SP.1 Terwujudnya pembangunan hukum, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang hukum INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) IKP 1.2 Persentase capaian kinerja Kementerian Hukum	PENANGGUNG JAWAB IKP Deputi Bidang Hukum	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	90
	SATUAN IKP: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKP ini mengukur capaian kinerja pembangunan hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.
- Capaian kinerja pembangunan hukum direpresentasikan dalam IKSS teknis Kementerian hukum dan terkait langsung maupun tidak langsung dengan IPH.
- Capaian kinerja pembangunan hukum Kemenkum diukur melalui rata-rata capaian IKSS teknis Kementerian Hukum.

BUKTI REALISASI Laporan hasil perhitungan capaian kinerja Kementerian Hukum	SUMBER DATA • Deputi Bidang Hukum • Kementerian Hukum (Sekretariat Jenderal)
---	--

LEVEL KINERJA	: Kinerja strategis sub sektor
TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,3

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase capaian kinerja Kementerian Hukum, diukur dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Capaian IKSS teknis Kemenkum}}{\sum \text{total IKSS teknis Kemenkum}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data capaian IKSS teknis Kementerian Hukum
2. Ambil data total IKSS teknis Kementerian Hukum

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Deputi Bidang Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Deputi Bidang Hukum
 - Kementerian Hukum (Sekretariat Jenderal)
-
-

CATATAN KHUSUS

- IKSS teknis yang dimaksud adalah IKSS Kementerian Hukum yang dicapai melalui program teknis.
- IKSS terkait RB dan/atau dukungan manajemen tidak dimasukkan dalam perhitungan IKP ini.

SASARAN PROGRAM (SP) SP.1 Terwujudnya pembangunan hukum, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang hukum INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) IKP 1.3 Persentase Rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Hukum	PENANGGUNG JAWAB IKP Deputi Bidang Hukum	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKP: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKP ini mengukur banyaknya pemanfaatan rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Hukum.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil koordinasi dan analisis permasalahan lintas K/L di Bidang Hukum.
- Pemanfaatan rekomendasi kebijakan dapat berupa perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan (aksi) dan/atau Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan lainnya berdasarkan rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Hukum.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan, maka semakin baik capaian kinerja IKP ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung pemanfaatan rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Hukum

SUMBER DATA

Deputi Bidang Hukum

LEVEL KINERJA	: Kinerja strategis sub sektor
----------------------	--------------------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,3
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Hukum, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam menyelesaikan permasalahan lintas KL di bidang hukum}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Hukum yang dimanfaatkan K/L
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Hukum yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Deputi Bidang Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Deputi Bidang Hukum

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi kebijakan yang dihitung dalam IKP ini adalah rekomendasi kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan lintas K/L di bidang hukum, baik K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas maupun K/L lain yang relevan dengan pembangunan bidang hukum.
- Permasalahan lintas K/L di bidang hukum yang dimaksud dapat berasal dari inisiasi Kemenko Kumham Imipas berdasarkan hasil pemantauan dan analisis maupun inisiasi K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.



MANUAL IKK ESELON II LINGKUP DEPUTI BIDANG HUKUM

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Meningkatnya kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum	PENANGGUNG JAWAB IKK Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	3,15
	SATUAN IKK: Skala likert 1 – 4	

DEFINISI

- Tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum merupakan ukuran mengenai persepsi penerima layanan internal yang diselenggarakan di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Hukum
- Layanan dukungan manajemen meliputi
 - Layanan rencana program, kegiatan, dan anggaran
 - Layanan pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja
 - Layanan pengelolaan data dan sistem informasi
 - Layanan administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan
 - Layanan pimpinan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan BMN
 - Layanan dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan
 - Layanan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern

BUKTI REALISASI

Hasil survei kepuasan internal layanan
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi
Hukum

SUMBER DATA

Sekretariat Deputi Bidang
Koordinasi Hukum

LEVEL KINERJA : Kinerja Taktikal

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : 0,2

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Kepuasan Internal}}{\text{Target Tingkat Kepuasan Internal}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Tentukan variabel kepuasan internal
2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner
5. Hitung dengan rumus

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

6. Konversi nilai tersebut dengan rumus: SKM X 25
7. Petakan hasil perhitungan kedalam tabel berikut

Nilai Persepsi	NilaiInterval	NilaiInterval Konversi	Mutu Pelayanan	KinerjaUnit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	TidakBaik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	KurangBaik
3	3,0644-3,532	76,62-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	SangatBaik

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum

CATATAN KHUSUS

Penyusunan kuesioner kepuasan layanan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola administrasi hukum	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Tata Kelola Adm Hukum	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKK: Persentase (%)	

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait tata kelola administrasi hukum yang ditindaklanjuti

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja tata kelola administrasi hukum yang ditindaklanjuti oleh K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil monitoring dan analisis Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja tata kelola administrasi hukum.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait tata kelola administrasi hukum yang ditindaklanjuti

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Tata Kelola Adm Hukum
- Ditjen AHU Kementerian Hukum

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
 - *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
 - *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
 - *Output* → Skor: 0,1
-

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait tata kelola administrasi hukum yang ditindaklanjuti, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan terkait capaian kinerja tata kelola administrasi hukum yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait tata kelola administrasi hukum yang ditindaklanjuti
 2. Ambil data total rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait tata kelola administrasi hukum yang diberikan Kemenko Kumham Imipas
-

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Tata Kelola Adm Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Asdep Koordinasi Tata Kelola Adm Hukum
 - Ditjen AHU Kementerian Hukum
-

CATATAN KHUSUS

- Data dukung pembuktian rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait tata kelola administrasi hukum didapatkan melalui:
 - Rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Laporan kemajuan tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Data dukung spesifik yang diberikan Ditjen AHU Kementerian Hukum terkait tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola administrasi hukum	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Tata Kelola Adm Hukum	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKK: Persentase (%)	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.2 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Tata Kelola Administrasi Hukum		

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya tindak lanjut yang dilakukan Kementerian dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas atas rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Tata Kelola Administrasi Hukum.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil koordinasi dan analisis permasalahan lintas K/L di Bidang Tata Kelola Administrasi Hukum.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Tata Kelola Administrasi Hukum

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Tata Kelola Adm Hukum
- Ditjen AHU Kementerian Hukum

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Tata Kelola Administrasi Hukum, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti KL}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam menyelesaikan permasalahan lintas KL di bidang tata kelola adm hukum}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Tata Kelola Administrasi Hukum yang ditindaklanjuti K/L
 2. Ambil data total rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Tata Kelola Administrasi Hukum yang diberikan Kemenko Kumham Imipas
-

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Tata Kelola Adm Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Asdep Koordinasi Tata Kelola Adm Hukum
- Ditjen AHU Kementerian Hukum

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi kebijakan yang dihitung dalam IKK ini adalah rekomendasi kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan lintas K/L di bidang Tata Kelola Adm hukum, baik K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas maupun K/L lain yang relevan dengan pembangunan bidang hukum.
- Permasalahan lintas K/L di bidang Tata Kelola Adm hukum yang dimaksud dapat berasal dari inisiasi Kemenko Kumham Imipas berdasarkan hasil pemantauan dan analisis maupun inisiasi K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait pemanfaatan, pemberdayaan dan pelindungan KI yang ditindaklanjuti	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKK: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja pemanfaatan, pemberdayaan dan pelindungan KI yang ditindaklanjuti oleh K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil monitoring dan analisis Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja pemanfaatan, pemberdayaan dan pelindungan KI.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait pemanfaatan, pemberdayaan dan perlindungan KI yang ditindaklanjuti

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi pemanfaatan, pemberdayaan dan perlindungan KI
- Ditjen KI Kementerian Hukum

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait pemanfaatan, pemberdayaan dan perlindungan KI yang ditindaklanjuti, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan terkait capaian kinerja pemanfaatan, pemberdayaan dan perlindungan KI yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait pemanfaatan, pemberdayaan dan perlindungan KI yang ditindaklanjuti
 2. Ambil data total rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait pemanfaatan, pemberdayaan dan perlindungan KI yang diberikan Kemenko Kumham Imipas
-

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Asdep Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI
- Ditjen KI Kementerian Hukum

CATATAN KHUSUS

- Data dukung pembuktian rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI didapatkan melalui:
 - Rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Laporan kemajuan tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Data dukung spesifik yang diberikan Ditjen KI Kementerian Hukum terkait tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKK	
SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola administrasi hukum	Asdep Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKK: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya tindak lanjut yang dilakukan Kementerian dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas atas rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil koordinasi dan analisis permasalahan lintas K/L di Bidang Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI
- Ditjen KI Kementerian Hukum

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti KL}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam menyelesaikan permasalahan lintas KL di bidang pemanfaatan, pemberdayaan dan pelindungan KI}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI yang ditindaklanjuti K/L
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Asdep Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI
 - Ditjen KI Kementerian Hukum
-

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi kebijakan yang dihitung dalam IKK ini adalah rekomendasi kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan lintas K/L di bidang Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI, baik K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas maupun K/L lain yang relevan dengan pembangunan bidang hukum.
- Permasalahan lintas K/L di bidang Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI yang dimaksud dapat berasal dari inisiasi Kemenko Kumham Imipas berdasarkan hasil pemantauan dan analisis maupun inisiasi K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja pembangunan hukum dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait materi hukum dan Keadilan Restoratif	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Persentase rekomendasi kebijakan terkait pilar pembangunan hukum (materi hukum, kelembagaan hukum dan penegakan hukum) yang ditindaklanjuti	SATUAN IKK: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas terkait pilar materi hukum, kelembagaan hukum dan penegakan hukum pada IPH yang ditindaklanjuti Kementerian dibawah Kemenko Kumham Imipas.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil pengukuran IPH pada pilar materi hukum, kelembagaan hukum dan penegakan hukum.
- Pemanfaatan rekomendasi kebijakan dapat berupa perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan (aksi) dan/atau Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan lainnya berdasarkan rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas terkait pilar materi hukum, kelembagaan hukum dan penegakan hukum.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung pemanfaatan rekomendasi kebijakan terkait pilar materi hukum, kelembagaan hukum dan penegakan hukum pada IPH

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif
- BPHN, Kementerian Hukum

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan terkait pilar pembangunan hukum (materi hukum, kelembagaan hukum dan penegakan hukum) yang ditindaklanjuti, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan terkait pilar materi hukum, kelembagaan hukum dan penegakan hukum yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan terkait pilar materi hukum, kelembagaan hukum dan penegakan hukum yang ditindaklanjuti K/L
 2. Ambil data total rekomendasi kebijakan terkait pilar materi hukum, kelembagaan hukum dan penegakan hukum yang diberikan Kemenko Kumham Imipas
-

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Asdep Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif
- BPHN, Kementerian Hukum

CATATAN KHUSUS

- Data dukung pembuktian pemanfaatan rekomendasi kebijakan terkait pilar materi hukum, kelembagaan hukum dan penegakan hukum didapatkan melalui:
 - Laporan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi kebijakan terkait pilar materi hukum, kelembagaan hukum dan penegakan hukum yang diberikan Kemenko Kumham Imipas, dan/atau
 - *Policy brief*/Naskah Akademik/Naskah Urgensi yang menjadi landasan dalam penyusunan PUU terkait rekomendasi kebijakan yang diberikan, dan/atau
 - Data dukung spesifik yang diberikan Kementerian Hukum terkait pemanfaatan rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Materi Hukum dan Keadilan Restoratif	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKK: Persentase (%)	

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.2 Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Materi Hukum dan Keadilan Restoratif yang ditindaklanjuti

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Materi Hukum dan Keadilan Restoratif yang ditindaklanjuti oleh K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil monitoring dan analisis Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Materi Hukum dan Keadilan Restoratif.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Materi Hukum dan Keadilan Restoratif yang ditindaklanjuti

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif
- Ditjen PP, Kementerian Hukum
- BPHN, Kementerian Hukum
- Ditjen KI, Kementerian Hukum
- Ditjen AHU, Kementerian Hukum

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Materi Hukum dan Keadilan Restoratif yang ditindaklanjuti, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan terkait capaian kinerja materi hukum dan keadilan restoratif yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Materi Hukum dan Keadilan Restoratif yang ditindaklanjuti
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Materi Hukum dan Keadilan Restoratif yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif

CATATAN KHUSUS

- Data dukung pembuktian rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Materi Hukum dan Keadilan Restoratif didapatkan melalui:
 - Rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Laporan kemajuan tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Data dukung spesifik yang diberikan Ditjen PP, BPHN, Ditjen KI dan Ditjen AHU Kementerian Hukum terkait tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Materi Hukum dan Keadilan Restoratif	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Materi Hukum dan Keadilan Restoratif	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKK: Persentase (%)	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.3 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI		

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya tindak lanjut yang dilakukan Kementerian dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas atas rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Materi Hukum dan Keadilan Restoratif.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil koordinasi dan analisis permasalahan lintas K/L di Bidang Materi Hukum dan Keadilan Restoratif.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Materi Hukum dan Keadilan Restoratif

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif
- Ditjen PP, Kementerian Hukum
- BPHN, Kementerian Hukum
- Ditjen KI, Kementerian Hukum
- Ditjen AHU, Kementerian Hukum

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Materi Hukum dan Keadilan Restoratif, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti KL}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam menyelesaikan permasalahan lintas KL di bidang Materi Hukum dan Keadilan Restoratif}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Materi Hukum dan Keadilan Restoratif yang ditindaklanjuti K/L
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Materi Hukum dan Keadilan Restoratif yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Asdep Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif
 - Ditjen PP, Kementerian Hukum
 - BPHN, Kementerian Hukum
 - Ditjen KI, Kementerian Hukum
 - Ditjen AHU, Kementerian Hukum
-

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi kebijakan yang dihitung dalam IKK ini adalah rekomendasi kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan lintas K/L di bidang Materi Hukum dan Keadilan Restoratif, baik K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas maupun K/L lain yang relevan dengan pembangunan bidang hukum.
- Permasalahan lintas K/L di bidang Materi Hukum dan Keadilan Restoratif yang dimaksud dapat berasal dari inisiasi Kemenko Kumham Imipas berdasarkan hasil pemantauan dan analisis maupun inisiasi K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKK	
SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja pembangunan hukum dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum	Asdep Koordinasi Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKK: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas terkait pilar budaya hukum dan informasi dan komunikasi hukum pada IPH yang ditindaklanjuti Kementerian dibawah Kemenko Kumham Imipas.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil pengukuran IPH pada pilar materi budaya hukum dan informasi dan komunikasi hukum.
- Pemanfaatan rekomendasi kebijakan dapat berupa perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan (aksi) dan/atau Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan lainnya berdasarkan rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas terkait pilar budaya hukum dan informasi dan komunikasi hukum.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung pemanfaatan rekomendasi kebijakan terkait pilar budaya hukum dan informasi dan komunikasi hukum pada IPH

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Budaya, Informasi dan Komunikasi
- BPHN, Kementerian Hukum
- Ditjen KI, Kementerian Hukum

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan terkait pilar pembangunan hukum (budaya hukum dan informasi dan komunikasi hukum) yang ditindaklanjuti, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan terkait pilar budaya hukum dan informasi dan komunikasi hukum yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan terkait pilar budaya hukum dan informasi dan komunikasi hukum yang ditindaklanjuti K/L
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan terkait pilar budaya hukum dan informasi dan komunikasi hukum yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Asdep Koordinasi Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum
 - BPHN, Kementerian Hukum
 - Ditjen KI, Kementerian Hukum
-

CATATAN KHUSUS

- Data dukung pembuktian pemanfaatan rekomendasi kebijakan terkait pilar Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum didapatkan melalui:
 - Laporan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi kebijakan terkait pilar Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum yang diberikan Kemenko Kumham Imipas, dan/atau
 - *Policy brief*/Naskah Akademik/Naskah Urgensi yang menjadi landasan dalam penyusunan PUU terkait rekomendasi kebijakan yang diberikan, dan/atau
 - Data dukung spesifik yang diberikan Kementerian Hukum terkait pemanfaatan rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKK: Persentase (%)	

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.2 Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum yang ditindaklanjuti

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum yang ditindaklanjuti oleh K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil monitoring dan analisis Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum yang ditindaklanjuti

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum
- BPHN, Kementerian Hukum
- Ditjen KI, Kementerian Hukum

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum yang ditindaklanjuti, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan terkait capaian kinerja budaya, informasi dan komunikasi hukum yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum yang ditindaklanjuti
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum

CATATAN KHUSUS

- Data dukung pembuktian rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum didapatkan melalui:
 - Rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Laporan kemajuan tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Data dukung spesifik yang diberikan BPHN dan Ditjen KI terkait tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.3 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum	SATUAN IKK: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya tindak lanjut yang dilakukan Kementerian dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas atas rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil koordinasi dan analisis permasalahan lintas K/L di Bidang Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum
- BPHN, Kementerian Hukum
- Ditjen KI, Kementerian Hukum

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti KL}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam menyelesaikan permasalahan lintas KL di bidang budaya hukum, informasi dan komunikasi hukum}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum yang ditindaklanjuti K/L
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Asdep Koordinasi Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum
- BPHN, Kementerian Hukum
- Ditjen KI, Kementerian Hukum

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi kebijakan yang dihitung dalam IKK ini adalah rekomendasi kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan lintas K/L di bidang Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum, baik K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas maupun K/L lain yang relevan dengan pembangunan bidang hukum.
- Permasalahan lintas K/L di bidang Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum yang dimaksud dapat berasal dari inisiasi Kemenko Kumham Imipas berdasarkan hasil pemantauan dan analisis maupun inisiasi K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi yang ditindaklanjuti	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Pembentukan PUU dan Litigasi <table border="1"> <tr> <th data-bbox="920 360 1157 483">TARGET (t-1/baseline)</th><th data-bbox="1157 360 1396 483">Target (T)</th></tr> <tr> <td data-bbox="920 483 1157 562">-</td><td data-bbox="1157 483 1396 562">100</td></tr> </table> SATUAN IKK: Persentase (%)	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)	-	100
TARGET (t-1/baseline)	Target (T)				
-	100				

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi yang ditindaklanjuti oleh K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil monitoring dan analisis Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi yang ditindaklanjuti

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi
- Ditjen PP Kementerian Hukum
- BPHN, Kementerian Hukum
- Ditjen KI, Kementerian Hukum

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi yang ditindaklanjuti, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan terkait capaian kinerja ppembentukan PUU dan litigasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi yang ditindaklanjuti

-
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi yang diberikan Kemenko Kumham Imipas
-

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Asdep Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi
 - Ditjen PP, Kementerian Hukum
 - BPHN, Kementerian Hukum
 - Ditjen KI, Kementerian Hukum
-

CATATAN KHUSUS

- Data dukung pembuktian rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi didapatkan melalui:
 - Rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Laporan kemajuan tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Data dukung spesifik yang diberikan Ditjen PP, BPHN dan Ditjen KI Kementerian Hukum terkait tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.2 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Koordinasi Pembentukan PUU dan Litigasi	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
SATUAN IKK: Persentase (%)		

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya tindak lanjut yang dilakukan Kementerian dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas atas rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil koordinasi dan analisis permasalahan lintas K/L di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II..
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi
- Ditjen PP Kementerian Hukum,
- BPHN, Kementerian Hukum
- Ditjen KI, Kementerian Hukum

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti KL}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam menyelesaikan permasalahan lintas KL di bidang pembentukan PUU dan litigasi}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi yang ditindaklanjuti K/L
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Asdep Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi
 - Ditjen PP, Kementerian Hukum
 - BPHN, Kementerian Hukum
 - Ditjen KI, Kementerian Hukum
-

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi kebijakan yang dihitung dalam IKK ini adalah rekomendasi kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan lintas K/L di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi, baik K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas maupun K/L lain yang relevan dengan pembangunan bidang hukum.
- Permasalahan lintas K/L di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi yang dimaksud dapat berasal dari inisiasi Kemenko Kumham Imipas berdasarkan hasil pemantauan dan analisis maupun inisiasi K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

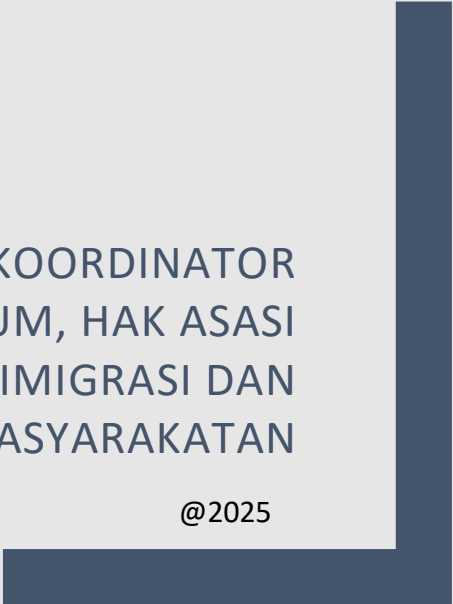


DOKUMEN

MANUAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM LINGKUP DEPUTI BIDANG HAK ASASI MANUSIA

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG HUKUM, HAK ASASI
MANUSIA, IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN

@2025





MANUAL IKP DEPUTI BIDANG HAM

SASARAN PROGRAM (SP) SP.1 Terwujudnya capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) IKP 1.1 Persentase capaian kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia	PENANGGUNG JAWAB IKP Deputi Bidang Koordinasi HAM	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	75
	SATUAN IKP: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKP ini mengukur capaian kinerja pembangunan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian HAM, meliputi penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM.
- Capaian kinerja pembangunan HAM direpresentasikan dalam IKSS teknis Kementerian HAM.
- Capaian kinerja pembangunan HAM Kementerian HAM diukur melalui rata-rata capaian IKSS teknis Kementerian HAM.

BUKTI REALISASI Laporan hasil perhitungan capaian kinerja Kementerian HAM	SUMBER DATA • Deputi Bidang Koordinasi HAM • Kementerian HAM (Sekretariat Jenderal)
---	---

LEVEL KINERJA	: Kinerja strategis sub sektor
TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,3

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase capaian kinerja Kementerian HAM, diukur dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Capaian IKSS teknis KemenHAM}}{\sum \text{total IKSS teknis KemenHAM}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data capaian IKSS teknis Kementerian HAM
2. Ambil data total IKSS teknis Kementerian HAM

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Deputi Bidang HAM

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Deputi Bidang HAM
 - Kementerian HAM (Sekretariat Jenderal)
-
-

CATATAN KHUSUS

- IKSS teknis yang dimaksud adalah IKSS Kementerian HAM yang dicapai melalui program teknis.
- IKSS terkait RB dan/atau dukungan manajemen tidak dimasukkan dalam perhitungan IKP ini.

SASARAN PROGRAM (SP) SP.1 Terwujudnya capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) IKP 1.2 Persentase Rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang HAM	PENANGGUNG JAWAB IKP Deputi Bidang Koordinasi HAM	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKP: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKP ini mengukur banyaknya pemanfaatan rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang HAM.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil koordinasi dan analisis permasalahan lintas K/L di Bidang HAM.
- Pemanfaatan rekomendasi kebijakan dapat berupa perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan (aksi) dan/atau Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan lainnya berdasarkan rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang HAM.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan, maka semakin baik capaian kinerja IKP ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung pemanfaatan rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang HAM

SUMBER DATA

Deputi Bidang Koordinasi HAM

LEVEL KINERJA : Kinerja strategis sub sektor

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : 0,3

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang HAM, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam menyelesaikan permasalahan lintas KL di bidang HAM}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang HAM yang dimanfaatkan K/L
 2. Ambil data total rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang HAM yang diberikan Kemenko Kumham Imipas
-
-

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Deputi Bidang HAM

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Deputi Bidang HAM

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi kebijakan yang dihitung dalam IKP ini adalah rekomendasi kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan lintas K/L di bidang HAM, baik K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas maupun K/L lain yang relevan dengan pembangunan bidang hukum.
- Permasalahan lintas K/L di bidang HAM yang dimaksud dapat berasal dari inisiasi Kemenko Kumham Imipas berdasarkan hasil pemantauan dan analisis maupun inisiasi K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.



MANUAL IKK ESELON II LINGKUP DEPUTI BIDANG HAM

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Meningkatnya kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi HAM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi HAM	PENANGGUNG JAWAB IKK Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi HAM	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	3,15
	SATUAN IKK: Skala likert 1 – 4	

DEFINISI

- Tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi HAM merupakan ukuran mengenai persepsi penerima layanan internal yang diselenggarakan di lingkup Deputy Bidang Koordinasi HAM
- Layanan dukungan manajemen meliputi
 - Layanan rencana program, kegiatan, dan anggaran
 - Layanan pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja
 - Layanan pengelolaan data dan sistem informasi
 - Layanan administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan
 - Layanan pimpinan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan BMN
 - Layanan dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan
 - Layanan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern

BUKTI REALISASI

Hasil survei kepuasan internal layanan
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi
HAM

SUMBER DATA

Sekretariat Deputi Bidang
Koordinasi HAM

LEVEL KINERJA : Kinerja Taktikal

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : 0,2

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Kepuasan Internal}}{\text{Target Tingkat Kepuasan Internal}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Tentukan variabel kepuasan internal
2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner
5. Hitung dengan rumus

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

6. Konversi nilai tersebut dengan rumus: SKM X 25
7. Petakan hasil perhitungan kedalam tabel berikut

Nilai Persepsi	NilaiInterval	NilaiInterval Konversi	Mutu Pelayanan	KinerjaUnit Pelayanan
1	1,0022,5996	25,00264,99	D	TidakBaik
2	2,6023,064	65,00276,60	C	KurangBaik
3	3,06443,532	76,62288,30	B	Baik
4	3,53244,00	88,312100,00	A	SangatBaik

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi HAM

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi HAM

CATATAN KHUSUS

Penyusunan kuesioner kepuasan layanan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Kebijakan HAM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Kebijakan HAM yang ditindaklanjuti	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Kebijakan HAM	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKK: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Kebijakan HAM yang ditindaklanjuti oleh K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil monitoring dan analisis Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Kebijakan HAM.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Kebijakan HAM yang ditindaklanjuti

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Kebijakan HAM
- Ditjen IDP, Kementerian HAM

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Kebijakan HAM yang ditindaklanjuti, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan terkait capaian kinerja kebijakan HAM yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Kebijakan HAM yang ditindaklanjuti
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Kebijakan HAM yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Kebijakan HAM

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Asdep Koordinasi Kebijakan HAM
 - Ditjen IDP Kementerian HAM
-

CATATAN KHUSUS

- Data dukung pembuktian rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Kebijakan HAM didapatkan melalui:
 - Rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Laporan kemajuan tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Data dukung spesifik yang diberikan Ditjen IDP Kementerian HAM terkait tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Kebijakan HAM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.2 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Kebijakan HAM	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Kebijakan HAM	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKK: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya tindak lanjut yang dilakukan Kementerian dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas atas rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Kebijakan HAM.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil koordinasi dan analisis permasalahan lintas K/L di Bidang Kebijakan HAM.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Kebijakan HAM

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Kebijakan HAM
- Ditjen IDP, Kementerian HAM

LEVEL KINERJA : Kinerja Taktikal

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : 0,2

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Kebijakan HAM, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti KL}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam menyelesaikan permasalahan lintas KL di bidang kebijakan HAM}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Kebijakan HAM yang ditindaklanjuti K/L
 2. Ambil data total rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Kebijakan HAM yang diberikan Kemenko Kumham Imipas
-
-

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Kebijakan HAM

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Asdep Koordinasi Kebijakan HAM
- Ditjen IDP Kementerian HAM

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi kebijakan yang dihitung dalam IKK ini adalah rekomendasi kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan lintas K/L di Kebijakan HAM, baik K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas maupun K/L lain yang relevan dengan pembangunan bidang hukum.
- Permasalahan lintas K/L di bidang Kebijakan HAM yang dimaksud dapat berasal dari inisiasi Kemenko Kumham Imipas berdasarkan hasil pemantauan dan analisis maupun inisiasi K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	71
	SATUAN IKK: Persentase (%)	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti		

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja penyelesaian pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti oleh K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil monitoring dan analisis Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja penyelesaian pelanggaran HAM berat.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi penyelesaian pelanggaran HAM berat
- Ditjen IDP Kementerian HAM

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan terkait capaian kinerja pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan capaian kinerja penyelesaian pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti
 2. Ambil data total rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat yang diberikan Kemenko Kumham Imipas
-

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Asdep Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
- Ditjen PDK Kementerian HAM

CATATAN KHUSUS

- Data dukung pembuktian rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat didapatkan melalui:
 - Rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Laporan kemajuan tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Data dukung spesifik yang diberikan Ditjen PDK Kementerian HAM terkait tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.2 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang penyelesaian pelanggaran HAM berat	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	71
SATUAN IKK: Persentase (%)		

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya tindak lanjut yang dilakukan Kementerian dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas atas rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang penyelesaian pelanggaran HAM berat.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil koordinasi dan analisis permasalahan lintas K/L di Bidang penyelesaian pelanggaran HAM berat.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang penyelesaian pelanggaran HAM berat

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi penyelesaian pelanggaran HAM berat
- Ditjen PDK Kementerian HAM

LEVEL KINERJA : Kinerja Taktikal

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : 0,2

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang penyelesaian pelanggaran HAM berat, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti KL}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam menyelesaikan permasalahan lintas KL di bidang pelanggaran HAM berat}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang penyelesaian pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti K/L
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang penyelesaian pelanggaran HAM berat yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Asdep Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
 - Ditjen PDK Kementerian HAM
-

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi kebijakan yang dihitung dalam IKK ini adalah rekomendasi kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan lintas K/L di bidang penyelesaian pelanggaran HAM berat, baik K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas maupun K/L lain yang relevan dengan pembangunan bidang hukum.
- Permasalahan lintas K/L di bidang penyelesaian pelanggaran HAM berat yang dimaksud dapat berasal dari inisiasi Kemenko Kumham Imipas berdasarkan hasil pemantauan dan analisis maupun inisiasi K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pembangunan dan Kerja Sama HAM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pembangunan dan Kerja Sama HAM yang ditindaklanjuti	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKK: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Pembangunan dan Kerja Sama HAM yang ditindaklanjuti oleh K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil monitoring dan analisis Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Pembangunan dan Kerja Sama HAM.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pembangunan dan Kerja Sama HAM yang ditindaklanjuti

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM
- Ditjen PDK, Kementerian HAM
- Ditjen IDP, Kementerian HAM

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pembangunan dan Kerja Sama HAM yang ditindaklanjuti, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan terkait capaian kinerja pembangunan dan kerja sama HAM yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pembangunan dan Kerja Sama HAM yang ditindaklanjuti
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pembangunan dan Kerja Sama HAM yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM

CATATAN KHUSUS

- Data dukung pembuktian rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pembangunan dan Kerja Sama HAM didapatkan melalui:
 - Rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Laporan kemajuan tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Data dukung spesifik yang diberikan Ditjen PDK dan Ditjen IDP Kementerian HAM terkait tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pembangunan dan Kerja Sama HAM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.2 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Pembangunan dan Kerja Sama HAM	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Pembangunan dan Kerja Sama HAM	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
SATUAN IKK: Persentase (%)		

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya tindak lanjut yang dilakukan Kementerian dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas atas rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Pembangunan dan Kerja Sama HAM.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil koordinasi dan analisis permasalahan lintas K/L di Bidang Pembangunan dan Kerja Sama HAM.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Pembangunan dan Kerja Sama HAM

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM
- Ditjen PDK, Kementerian HAM
- Ditjen IDP, Kementerian HAM

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Pembangunan dan Kerja Sama HAM, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti KL}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam menyelesaikan permasalahan lintas KL di bidang Pembangunan dan Kerja Sama HAM}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Pembangunan dan Kerja Sama HAM yang ditindaklanjuti K/L
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Pembangunan dan Kerja Sama HAM yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Asdep Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM
 - Ditjen PDK, Kementerian HAM
 - Ditjen IDP, Kementerian HAM
-

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi kebijakan yang dihitung dalam IKK ini adalah rekomendasi kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan lintas K/L di bidang Pembangunan dan Kerja Sama HAM, baik K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas maupun K/L lain yang relevan dengan pembangunan bidang hukum.
- Permasalahan lintas K/L di bidang Pembangunan dan Kerja Sama HAM yang dimaksud dapat berasal dari inisiasi Kemenko Kumham Imipas berdasarkan hasil pemantauan dan analisis maupun inisiasi K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan yang ditindaklanjuti	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKK: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan yang ditindaklanjuti oleh K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil monitoring dan analisis Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan yang ditindaklanjuti

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan
- Ditjen IDP, Kementerian HAM

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan yang ditindaklanjuti, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan terkait capaian kinerja pemberdayaan dan pemajuan hak kelompok rentan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan yang ditindaklanjuti
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan

CATATAN KHUSUS

- Data dukung pembuktian rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan didapatkan melalui:
 - Rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Laporan kemajuan tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Data dukung spesifik yang diberikan Ditjen IDP, Kementerian HAM terkait tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.2 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan	SATUAN IKK: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya tindak lanjut yang dilakukan Kementerian dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas atas rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil koordinasi dan analisis permasalahan lintas K/L di Bidang Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan
- Ditjen IDP, Kementerian HAM

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti KL}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipis dalam menyelesaikan permasalahan lintas KL di bidang pemberdayaan dan pemajuan hak kelompok rentan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan yang ditindaklanjuti K/L
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Asdep Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan
- Ditjen IDP, Kementerian HAM

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi kebijakan yang dihitung dalam IKK ini adalah rekomendasi kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan lintas K/L di bidang Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan, baik K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas maupun K/L lain yang relevan dengan pembangunan bidang hukum.
- Permasalahan lintas K/L di bidang Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan yang dimaksud dapat berasal dari inisiasi Kemenko Kumham Imipas berdasarkan hasil pemantauan dan analisis maupun inisiasi K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pendidikan HAM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pendidikan HAM yang ditindaklanjuti	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Pendidikan HAM	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKK: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Pendidikan HAM yang ditindaklanjuti oleh K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil monitoring dan analisis Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Pendidikan HAM.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pendidikan HAM yang ditindaklanjuti

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Pendidikan HAM
- PPSDM, Kementerian HAM

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pendidikan HAM yang ditindaklanjuti, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan terkait capaian kinerja pendidikan HAM yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pendidikan HAM yang ditindaklanjuti
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pendidikan HAM yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Pendidikan HAM

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Asdep Koordinasi Pendidikan HAM
 - PPSDM, Kementerian HAM
-

CATATAN KHUSUS

- Data dukung pembuktian rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Pendidikan HAM didapatkan melalui:
 - Rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Laporan kemajuan tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Data dukung spesifik yang diberikan PPSDM Kementerian HAM terkait tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pendidikan HAM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.2 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Pendidikan HAM	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Pendidikan HAM	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKK: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya tindak lanjut yang dilakukan Kementerian dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas atas rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Pendidikan HAM.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil koordinasi dan analisis permasalahan lintas K/L di Bidang Pendidikan HAM.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Pendidikan HAM

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Pendidikan HAM
- PPSDM Kementerian HAM

LEVEL KINERJA : Kinerja Taktikal

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : 0,2

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Pendidikan HAM, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti KL}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam menyelesaikan permasalahan lintas KL di bidang pendidikan HAM}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Pendidikan HAM yang ditindaklanjuti K/L
 2. Ambil data total rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Pendidikan HAM yang diberikan Kemenko Kumham Imipas
-
-

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Pendidikan HAM

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Pendidikan HAM

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi kebijakan yang dihitung dalam IKK ini adalah rekomendasi kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan lintas K/L di bidang Pendidikan HAM, baik K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas maupun K/L lain yang relevan dengan pembangunan bidang hukum.
- Permasalahan lintas K/L di bidang Pendidikan HAM yang dimaksud dapat berasal dari inisiasi Kemenko Kumham Imipas berdasarkan hasil pemantauan dan analisis maupun inisiasi K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

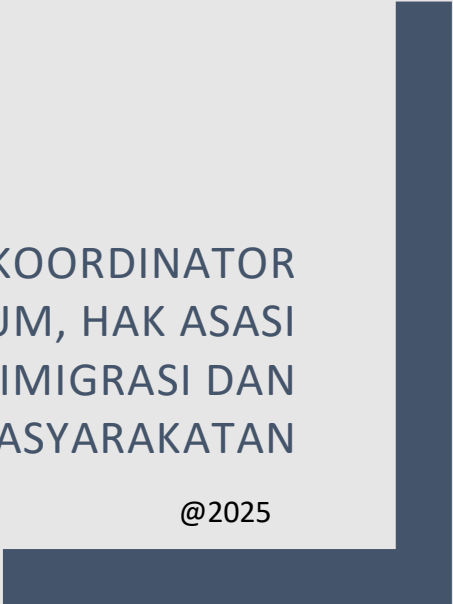


DOKUMEN

MANUAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM LINGKUP DEPUTI BIDANG KEIMIGRASIAN DAN PEMASYARAKATAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG HUKUM, HAK ASASI
MANUSIA, IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN

@2025





MANUAL IKP DEPUTI BIDANG IMIPAS

SASARAN PROGRAM (SP) SP.1 Terwujudnya capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Keimigrasian dan Pemasarakatan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) IKP 1.1 Persentase capaian kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKP Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	90
	SATUAN IKP: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKP ini mengukur capaian kinerja pembangunan hukum sub bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Imipas.
- Capaian kinerja pembangunan hukum sub bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan direpresentasikan dalam IKSS teknis Kementerian Imipas.
- Capaian kinerja pembangunan hukum sub bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan Kementerian Imipas diukur melalui rata-rata capaian IKSS teknis Kementerian Imipas.

BUKTI REALISASI Laporan hasil perhitungan capaian kinerja Kementerian Imipas	SUMBER DATA • Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan • Kementerian Imipas (Sekretariat Jenderal)
--	---

LEVEL KINERJA	: Kinerja strategis sub sektor
----------------------	--------------------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,3
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase capaian kinerja Kementerian Imipas, diukur dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Capaian IKSS teknis Kemen Imipas}}{\sum \text{total IKSS teknis Kemen Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data capaian IKSS teknis Kementerian Imipas
2. Ambil data total IKSS teknis Kementerian Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Deputi Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Deputi Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan
 - Kementerian Imipas (Sekretariat Jenderal)
-

CATATAN KHUSUS

- IKSS teknis yang dimaksud adalah IKSS Kementerian Imipas yang dicapai melalui program teknis dan terkait dengan Pembangunan hukum sub bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan.
- IKSS terkait RB dan/atau dukungan manajemen tidak dimasukkan dalam perhitungan IKP ini.

SASARAN PROGRAM (SP) SP.1 Terwujudnya capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Keimigrasian dan Pemasarakatan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) IKP 1.2 Persentase Rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKP Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKP: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKP ini mengukur banyaknya pemanfaatan rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil koordinasi dan analisis permasalahan lintas K/L di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan.
- Pemanfaatan rekomendasi kebijakan dapat berupa perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan (aksi) dan/atau Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan lainnya berdasarkan rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan, maka semakin baik capaian kinerja IKP ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung pemanfaatan rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan

SUMBER DATA

Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan

LEVEL KINERJA : Kinerja strategis sub sektor

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : 0,3

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam menyelesaikan permasalahan lintas KL di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang dimanfaatkan K/L
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Deputi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Deputi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi kebijakan yang dihitung dalam IKP ini adalah rekomendasi kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan lintas K/L di bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan, baik K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas maupun K/L lain yang relevan dengan pembangunan bidang hukum.
- Permasalahan lintas K/L di bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang dimaksud dapat berasal dari inisiasi Kemenko Kumham Imipas berdasarkan hasil pemantauan dan analisis maupun inisiasi K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.



MANUAL IKK ESELON II LINGKUP DEPUTI BIDANG IMIPAS

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Meningkatnya kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	3,15
	SATUAN IKK: Skala likert 1 – 4	

DEFINISI

- Tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan merupakan ukuran mengenai persepsi penerima layanan internal yang diselenggarakan di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan
- Layanan dukungan manajemen meliputi
 - Layanan rencana program, kegiatan, dan anggaran
 - Layanan pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja
 - Layanan pengelolaan data dan sistem informasi
 - Layanan administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan
 - Layanan pimpinan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan BMN
 - Layanan dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan
 - Layanan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern

BUKTI REALISASI

Hasil survei kepuasan internal layanan
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi
Keimigrasian dan Pemasarakatan

SUMBER DATA

Sekretariat Deputi Bidang
Koordinasi Keimigrasian dan
Pemasarakatan

LEVEL KINERJA : Kinerja Taktikal

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

**JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG
KENDALI IKU** : 0,2

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Kepuasan Internal}}{\text{Target Tingkat Kepuasan Internal}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Tentukan variabel kepuasan internal
2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner
5. Hitung dengan rumus

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

6. Konversi nilai tersebut dengan rumus: SKM X 25
7. Petakan hasil perhitungan kedalam tabel berikut

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,59	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,06	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,06 - 3,53	76,62 - 88,30	B	Baik
4	3,53 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Penyusunan kuesioner kepuasan layanan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKK: Persentase (%)	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang ditindaklanjuti		

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang ditindaklanjuti oleh K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil monitoring dan analisis Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang ditindaklanjuti

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan
- Ditjen Imigrasi (Dit. Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan)
- Ditjen Pemasyarakatan (Dit. TI dan Kerjasama)

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang ditindaklanjuti, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan terkait capaian kinerja kerjasama kelembagaan Imipas yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang ditindaklanjuti

-
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas
-

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan

CATATAN KHUSUS

- Data dukung pembuktian rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan didapatkan melalui:
 - Rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Laporan kemajuan tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Data dukung spesifik yang diberikan Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasarakatan Kementerian Imipas terkait tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.2 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan	SATUAN IKK: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya tindak lanjut yang dilakukan Kementerian dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas atas rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil koordinasi dan analisis permasalahan lintas K/L di Bidang Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan
- Ditjen Imigrasi (Dit. Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan)
- Ditjen Pemasarakatan (Dit. TI dan Kerjasama)

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti KL}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam menyelesaikan permasalahan lintas KL di bidang kerjasama kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang ditindaklanjuti K/L.

-
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas
-

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Asdep Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan
 - Ditjen Imigrasi (Dit. Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan)
 - Ditjen Pemasarakatan (Dit. TI dan Kerjasama)
-

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi kebijakan yang dihitung dalam IKK ini adalah rekomendasi kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan lintas K/L di Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan, baik K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas maupun K/L lain yang relevan dengan pembangunan bidang hukum sub bidang Imipas.
- Permasalahan lintas K/L di bidang Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang dimaksud dapat berasal dari inisiasi Kemenko Kumham Imipas berdasarkan hasil pemantauan dan analisis maupun inisiasi K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Tata Kelola Keimigrasian INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Tata Kelola Keimigrasian yang ditindaklanjuti	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKK: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Tata Kelola Keimigrasian yang ditindaklanjuti oleh K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil monitoring dan analisis Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Tata Kelola Keimigrasian.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Tata Kelola Keimigrasian yang ditindaklanjuti

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian
- SetDitjen Imigrasi Kementerian Imipas

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Tata Kelola Keimigrasian yang ditindaklanjuti, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan terkait capaian kinerja tata kelola Keimigrasian yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan capaian kinerja Tata Kelola Keimigrasian yang ditindaklanjuti
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Tata Kelola Keimigrasian yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian

CATATAN KHUSUS

- Data dukung pembuktian rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Tata Kelola Keimigrasian didapatkan melalui:
 - Rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Laporan kemajuan tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Data dukung spesifik yang diberikan SetDitjen Imigrasi Kementerian Imipas terkait tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Tata Kelola Keimigrasian INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.2 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Tata Kelola Keimigrasian	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	71
	SATUAN IKK: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya tindak lanjut yang dilakukan Kementerian dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas atas rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Tata Kelola Keimigrasian.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil koordinasi dan analisis permasalahan lintas K/L di Bidang Tata Kelola Keimigrasian.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Tata Kelola Keimigrasian

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian
- SetDitjen Imigrasi, Kementerian Imipas

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Tata Kelola Keimigrasian, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti KL}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam menyelesaikan permasalahan lintas KL di bidang tata kelola Keimigrasian}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Tata Kelola Keimigrasian yang ditindaklanjuti K/L
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Tata Kelola Keimigrasian yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Asdep Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian
 - SetDitjen Imigrasi, Kementerian Imipas
-

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi kebijakan yang dihitung dalam IKK ini adalah rekomendasi kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan lintas K/L di bidang Tata Kelola Keimigrasian, baik K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas maupun K/L lain yang relevan dengan pembangunan bidang hukum sub bidang Imipas.
- Permasalahan lintas K/L di bidang penyelesaian pelanggaran HAM berat yang dimaksud dapat berasal dari inisiasi Kemenko Kumham Imipas berdasarkan hasil pemantauan dan analisis maupun inisiasi K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Strategi Pelayanan Keimigrasian INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Strategi Pelayanan Keimigrasian yang ditindaklanjuti	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKK: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Strategi Pelayanan Keimigrasian yang ditindaklanjuti oleh K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil monitoring dan analisis Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Strategi Pelayanan Keimigrasian.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Strategi Pelayanan Keimigrasian yang ditindaklanjuti

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian
- SetDitjen Imigrasi, Kementerian Imipas

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Strategi Pelayanan Keimigrasian yang ditindaklanjuti, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan terkait capaian kinerja strategi pelayanan keimigrasian yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Strategi Pelayanan Keimigrasian yang ditindaklanjuti
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Strategi Pelayanan Keimigrasian yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian

CATATAN KHUSUS

- Data dukung pembuktian rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Strategi Pelayanan Keimigrasian didapatkan melalui:
 - Rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Laporan kemajuan tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Data dukung spesifik yang diberikan SetDitjen Imigrasi, Kementerian Imipas terkait tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Strategi Pelayanan Keimigrasian INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.2 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Strategi Pelayanan Keimigrasian	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Strategi Pelayanan Keimigrasian	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKK: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya tindak lanjut yang dilakukan Kementerian dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas atas rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Strategi Pelayanan Keimigrasian.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil koordinasi dan analisis permasalahan lintas K/L di Bidang Strategi Pelayanan Keimigrasian.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Strategi Pelayanan Keimigrasian

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian
- SetDitjen Imigrasi, Kementerian Imipras

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Strategi Pelayanan Keimigrasian, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti KL}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipras dalam menyelesaikan permasalahan lintas KL di bidang strategi pelayanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Strategi Pelayanan Keimigrasian yang ditindaklanjuti K/L
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Strategi Pelayanan Keimigrasian yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Asdep Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian
 - SetDitjen Imigrasi, Kementerian Imipas
-

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi kebijakan yang dihitung dalam IKK ini adalah rekomendasi kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan lintas K/L di bidang Strategi Pelayanan Keimigrasian, baik K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas maupun K/L lain yang relevan dengan pembangunan bidang hukum sub bidang Imipas.
- Permasalahan lintas K/L di bidang Strategi Pelayanan Keimigrasian yang dimaksud dapat berasal dari inisiasi Kemenko Kumham Imipas berdasarkan hasil pemantauan dan analisis maupun inisiasi K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Tata Kelola Pemasyarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKK: Persentase (%)	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Tata Kelola Pemasyarakatan yang ditindaklanjuti		

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Tata Kelola Pemasyarakatan yang ditindaklanjuti oleh K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil monitoring dan analisis Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Tata Kelola Pemasyarakatan.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Tata Kelola Pemasyarakatan yang ditindaklanjuti

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan
- Dit. SSPP, Ditjen Pemasyarakatan, Kementerian Imipas

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Tata Kelola Masyarakat yang ditindaklanjuti, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan terkait capaian kinerja tata kelola masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Tata Kelola Masyarakat yang ditindaklanjuti
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Tata Kelola Masyarakat yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Tata Kelola Masyarakat

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Tata Kelola Masyarakat

CATATAN KHUSUS

- Data dukung pembuktian rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Tata Kelola Pemasyarakatan didapatkan melalui:
 - Rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Laporan kemajuan tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Data dukung spesifik yang diberikan Ditjen Pemasyarakatan, Kementerian Imipas terkait tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Tata Kelola Pemasarakatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.2 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Tata Kelola Pemasarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Tata Kelola Pemasarakatan	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKK: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya tindak lanjut yang dilakukan Kementerian dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas atas rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Tata Kelola Pemasarakatan.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil koordinasi dan analisis permasalahan lintas K/L di Bidang Tata Kelola Pemasarakatan.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Tata Kelola Pemasarakatan

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemasarakatan
- Dit. SSPP, Ditjen Pemasarakatan, Kementerian IMIPAS

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Tata Kelola Pemasarakatan, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti KL}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam menyelesaikan permasalahan lintas KL di bidang Tata Kelola Pemasarakatan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Tata Kelola Pemasarakatan yang ditindaklanjuti K/L
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Tata Kelola Pemasarakatan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemasarakatan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemasarakatan
- Dit. SSP, Ditjen Pemasarakatan, Kementerian Imipas

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi kebijakan yang dihitung dalam IKK ini adalah rekomendasi kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan lintas K/L di bidang Tata Kelola Pemasarakatan, baik K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas maupun K/L lain yang relevan dengan pembangunan bidang hukum sub bidang Imipas.
- Permasalahan lintas K/L di bidang Tata Kelola Pemasarakatan yang dimaksud dapat berasal dari inisiasi Kemenko Kumham Imipas berdasarkan hasil pemantauan dan analisis maupun inisiasi K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Strategi Pelayanan Masyarakat	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Strategi Pelayanan Masyarakat	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKK: Persentase (%)	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.1 Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Strategi Pelayanan Masyarakat yang ditindaklanjuti		

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Strategi Pelayanan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil monitoring dan analisis Kemenko Kumham Imipas terkait capaian kinerja Strategi Pelayanan Masyarakat.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Strategi Pelayanan Masyarakat yang ditindaklanjuti	SUMBER DATA • Asdep Koordinasi Strategi Pelayanan Masyarakat • Dit. SSPP, Ditjen Pelayanan, Kementerian HAM
--	---

LEVEL KINERJA	: Kinerja Taktikal
----------------------	--------------------

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU	: <i>Exact</i>
-------------------------------------	----------------

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU	: 0,2
---	-------

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- *Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- *Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- *Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- *Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU	: <i>Maximize</i>
-----------------------------------	-------------------

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Strategi Pelayanan Masyarakatan yang ditindaklanjuti, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan terkait capaian kinerja strategi pelayanan masyarakatan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. Ambil data rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Strategi Pelayanan Masyarakatan yang ditindaklanjuti
2. Ambil data total rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Strategi Pelayanan Masyarakatan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Strategi Pelayanan Masyarakatan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Asdep Koordinasi Strategi Pelayanan Masyarakatan
 - Dit. SSPP, Ditjen Masyarakatan, Kementerian Imipas
-

CATATAN KHUSUS

- Data dukung pembuktian rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Strategi Pelayanan Masyarakatan didapatkan melalui:
 - Rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Laporan kemajuan tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II, dan/atau
 - Data dukung spesifik yang diberikan Ditjen Masyarakatan, Kementerian Imipas terkait tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas

SASARAN KEGIATAN (SK) SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Strategi Pelayanan Pemasarakatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) IKK 1.2 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Strategi Pelayanan Pemasarakatan	PENANGGUNG JAWAB IKK Asdep Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasarakatan	
	TARGET (t-1/baseline)	Target (T)
	-	100
	SATUAN IKK: Persentase (%)	

DEFINISI

- IKK ini mengukur banyaknya tindak lanjut yang dilakukan Kementerian dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas atas rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Strategi Pelayanan Pemasarakatan.
- Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil koordinasi dan analisis permasalahan lintas K/L di Bidang Strategi Pelayanan Pemasarakatan.
- Tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berupa rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh pejabat minimal setingkat eselon II dan/atau laporan kemajuan tindak lanjut yang disetujui oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
- Semakin banyak rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan, maka semakin baik capaian kinerja IKK ini.

BUKTI REALISASI

Laporan dan data dukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Strategi Pelayanan Masyarakat

SUMBER DATA

- Asdep Koordinasi Strategi Pelayanan Masyarakat
- Dit. SSPP, Ditjen Masyarakat, Kementerian Impas

LEVEL KINERJA : Kinerja Taktikal

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU : *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU/RENTANG KENDALI IKU : 0,2

Jenis/Kualitas/Rentang Kendali IKU dibagi menjadi 4, dengan skor:

- Intermediate Outcome* Level 1 → Skor: 0,4
- Intermediate Outcome* Level 2 → Skor: 0,3
- Immediate Outcome* → Skor: 0,2
- Output* → Skor: 0,1

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU : *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Strategi Pelayanan Masyarakat, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti KL}}{\text{Total rekomendasi kebijakan yang diberikan Kemenko Kumham Impas dalam menyelesaikan permasalahan lintas KL di bidang strategi pelayanan masyarakat}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

- Ambil data rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Strategi Pelayanan Masyarakat yang ditindaklanjuti K/L
- Ambil data total rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Strategi Pelayanan Masyarakat yang diberikan Kemenko Kumham Impas

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Strategi Pelayanan Masyarakat

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Asdep Koordinasi Strategi Pelayanan Masyarakat

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi kebijakan yang dihitung dalam IKK ini adalah rekomendasi kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan lintas K/L di bidang Strategi Pelayanan Masyarakat, baik K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas maupun K/L lain yang relevan dengan pembangunan bidang hukum sub bidang Imipas.
- Permasalahan lintas K/L di bidang Pendidikan HAM yang dimaksud dapat berasal dari inisiasi Kemenko Kumham Imipas berdasarkan hasil pemantauan dan analisis maupun inisiasi K/L dibawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.